

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil analisis data pada masing-masing indikator yang telah difokuskan pada delapan area yang telah dijelaskan pada definisi operasional yakni policy accountability, program accountability, Process Accountability, probity and legality accountability, kepemimpinan yang berkemampuan, diterima oleh semua pihak, pemahaman masyarakat, dan adaptasi secara terus menerus. Untuk membandingkan tentang akuntabilitas pelaksanaan dana Desa di Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. Pada tiap-tiap bagian tersebut akan menggunakan data sekunder yang telah melewati tahapan publikasi secara resmi oleh pemerintah desa maupun instansi Kecamatan dan Badan Pembedayaan masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lombok Utara. Agar memperkuat dan mempertajam analisis, maka penulis menggunakan hasil wawancara dan data dokumen keuangan Desa.

#### **V.1.1 Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam mengukur pencapaian tujuan atau atas hasil yang telah dicapai oleh pemerintah dalam mengelola pelaksanaan dana Desa. Selain itu juga kita dapat melihat apakah pemerintah memiliki cara lain dalam menyusun program dengan biaya minimal namun dengan hasil yang maksimal. Hal ini tentu bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mendukung strategi dalam capaian Visi, Misi yang tertuang dalam RPJMDes. Serta dimana tujuan dari organisasi dimana lembaga

publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada implemetasi program.

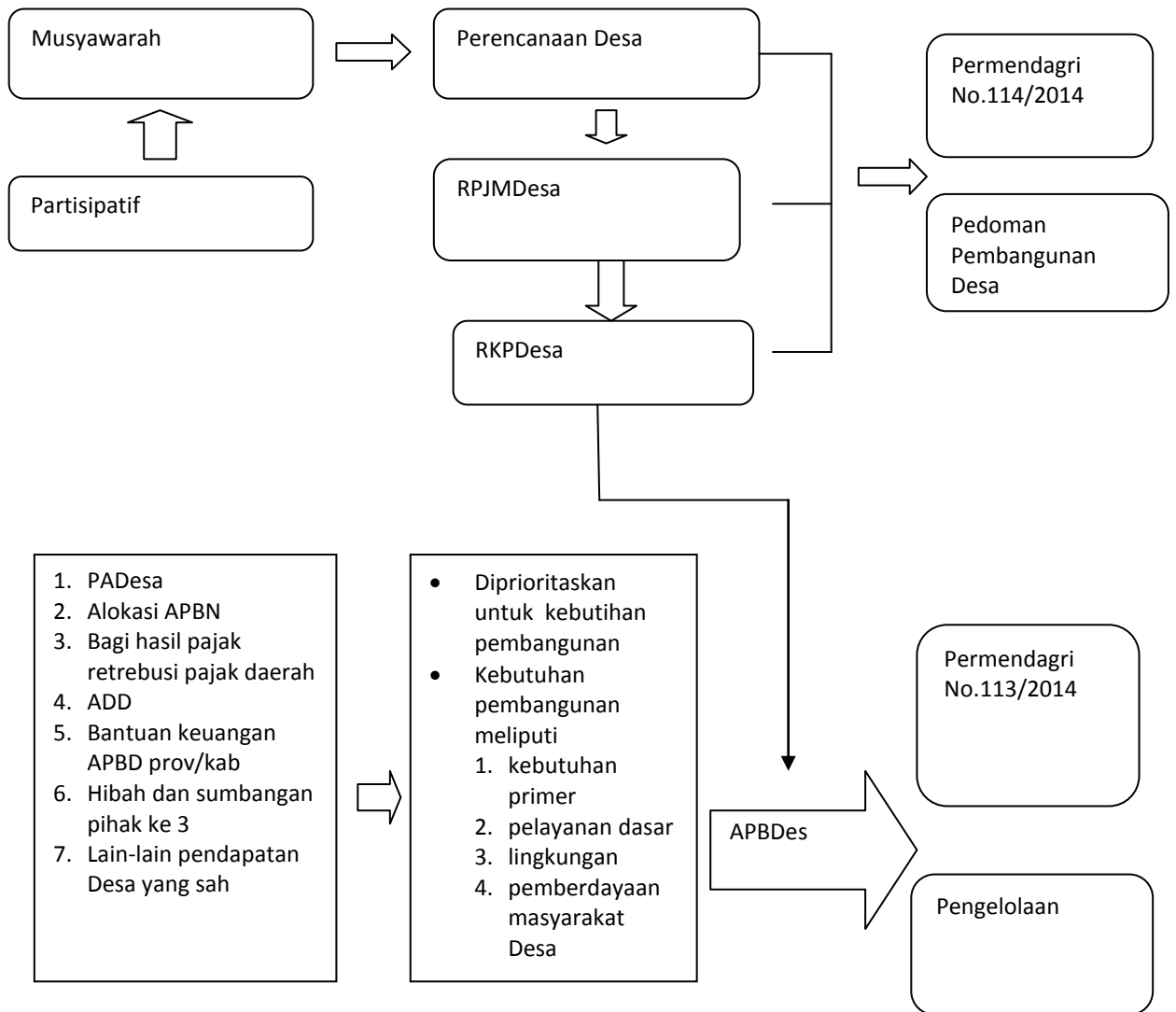
#### V.1.1. Perencanaan Program Pembangunan Desa

Membangun Desa sangat perlu konsep atau kerangka yang dimulai dari proses perencanaan Desa yang baik, dan diikuti oleh tata kelola program pemerintahan Desa yang baik, maka dari itu salah satu kunci untuk mencapai pembangunan Desa yang efektif maka diperlukan perencanaan program yang baik pula. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, yang pada akhirnya akan membuahkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam merencanakan pembangunan Desa. Proses formulasi, implemetasi dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan Desa wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan Desa yang bersekala local Desa. (Kesa,2015:11).

Dalam pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka dengan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau di sebut dengan Rencana Kerja Permerintahan Desa (RKP Desa) yang merupakan jabaran dari RPJMDes untuk jangka 1 ( satu) tahun Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam melakukan pembangunan Desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk harapan kesejateraan masyarakat Desa. Berikut gambar alur perencanaan dana Desa :

Gambar 3.1

Alur Perencanaan Dana Desa



Dengan hadirnya dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN kepada Desa dengan jumlah yang sangat besar maka sangat perlu perencanaan Desa, karna dalam mengelola anggaran yang cukup besar harus ada perencanaan yang matang dilakukan oleh pemerintah Desa agar pada saat

implementasi program pembangunan di Desa tepat sasaran dan terukur dengan melewati beberapa tahapan dalam perencanaan program yang dibangun di Desa.

Dalam wawancara dengan sekretaris Desa Teniga yaitu Bapak Muruardi SH menjelaskan bahwa :

Mekanisme perencanaan program ini melalui musrembangdus dan dibawa kemusrembang Desa sehingga yang kami lakukan bersifat bottom up ( program dari rakyat) yang kita masukan dalam RPJMDesa, setelah itu pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa. dalam implementasi program, kami menghimbau kepala dusun agar melibatkan masyarakat juga, (Wawancara tanggal 4 april 2018 11:00 WITA)

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa sangat memerlukan perencanaan yang benar-benar matang sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM Desa dan Rencana Kerja pembangunan Desa RKP Desa sehingga pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik, tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, keterlibatan partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan terkait dengan program pembangunan Desa itu sangat diperlukan.

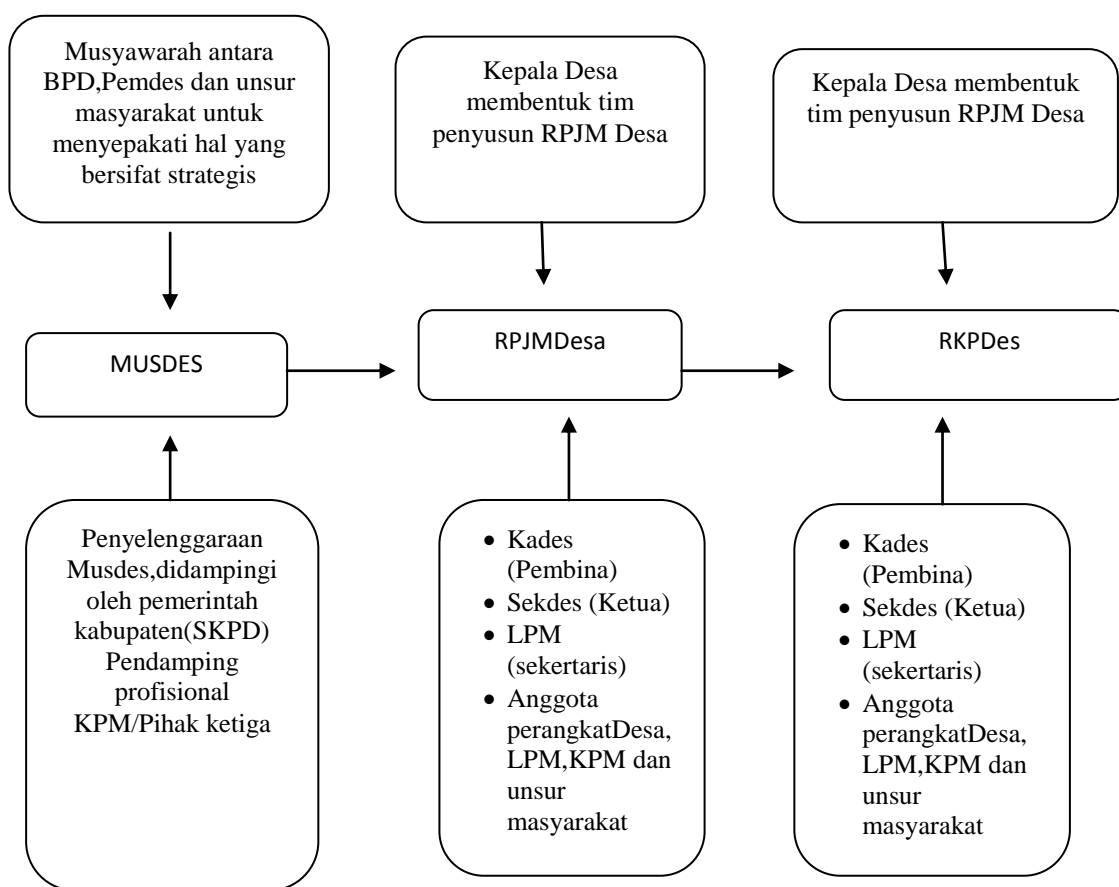
Fenomena yang terjadi di pemerintahan Desa Teniga, Tanjung dan Malaka sejauh ini melakukan musrembang yang tingkat Dusun dan Desa sejalan dengan harapan UU DESA NO 6 Tahun 2014 namun khusus Desa Teniga dan Malaka hanya menyerap aspirasi masyarakat dibidang Fisik saja seperti pembangunan rabat jalan dan gorong-gorong, dalam hal ini tingkat partisipasi pemuda di Desa teniga sangat minim alasan dari salah satu tokoh pemuda kurangnya mereka dilibatkan dalam mengatasi permasalahan Desa. Pemerintah Desa Malaka pun masih kurang dalam menghimpun aspirasi masyarakat dibidang pembudayaan masyarakat, rata –rata program Desa di fokuskan pada pembangunan fisik saja.

Agar lebih jelasnya terkait dengan perencanaan di pemerintahan Desa, berikut ini adalah gambaran proses perencanaan pembangunan Desa :

**Gambar 3.2**

**Proses Perencanaan**

**Peremendes**



RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi dari program kepala Desa yang disusun oleh tim penyusun RPJM Desa yang dikoordinasi dengan masukan dari masyarakat yang terlibat dalam pengkajian keadaan Desa perumusan masalah, penyebab, potensi, alternative, tindakan dan penentuan tindakan yang layak. Selain penjabaran visi dan misi Kepala Desa, RPJM Desa juga memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah

kebijakan pembangunan Desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi Desa dan disinkronkan dengan RPJMD pembangunan Kabupaten/kota.

RPJM Desa merupakan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memasukan lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat dari segala unsur. Dalam pembahasan masalah teknis yang dilakukan dalam diskusi ditengah masyarakat, musyawarah warga dan rapat komisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa, hal merupakan faktor yang penting mengingat masyarakat Desa merupakan bagian dari struktur social yang diharapkan akan mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan Desa. Disisi lain maksud dari tujuan penyusunan RPJMDesa ialah agar Pemerintah Desa dan masyarakat landasan dan pedoman dalam membangun penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 6 tahun kedepan. Berikut adalah tabel perencanaan program dari Desa Tanjung, Teniga dan Malaka sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Daftar Rencana Kerja Pembangunan Desa Tanjung, Teniga dan Malaka tahun 2017

Bidang	Desa Tanjung	Desa Teniga	Desa Malaka
Bidang penyelenggaraan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa</li> <li>2. Pembayaran tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa</li> <li>3. Pembayaran tunjangan Badan permusyawaratan Desa</li> <li>4. Kegiatan operasional pemerintah Desa</li> <li>5. Pembayaran insentif pelayan masyarakat</li> <li>6. Kegiatan operasional BPD</li> <li>7. Kegiatan study banding dan bimtek kepala Desa</li> <li>8. Kegiatan bimtek sekdes dan lembaga Desa</li> <li>9. Pengelolaan Data SID</li> <li>10. Program legislasi Desa</li> <li>11. Kegiatan pembuatan/penernitan sertifikat Tanah</li> <li>12. Kegiatan penyelenggaraan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat</li> <li>2. Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa</li> <li>3. Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat</li> <li>4. Pembayaran Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa</li> <li>5. Pembayaran Insentif Pelayan Masyarakat</li> <li>6. Kegiatan Operasional Pemerintah desa</li> <li>7. Kegiatan Operasional Badan Permasyarakatan Desa</li> <li>8. Kegiatan Study Banding Dan Bimtek Kepala Desa</li> <li>9. Kegiatan Bimtek Sekdes dan Lembaga Desa</li> <li>10. Kegiatan Pengelolaan Data SID (Sistem Informasi Desa )</li> <li>11. Program Legislasi Des</li> <li>12. Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemabayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa</li> <li>2. pembayaran penghasilan tambahan kepala Desa</li> <li>3. pembayaran tunjangan kepala Desa</li> <li>4. pembayaran BPD</li> <li>5. pembayaran insentif pelayan masyarakat</li> <li>6. kegiatan oprasional pemerintah Desa</li> <li>7. kegiatan operasional BPD</li> <li>8. Kegiatan study banding dan bimtek kepala Desa</li> <li>9.kegiatan bimtek sekdes dan prangkat Desa</li> <li>10. kegiatan pengelolaan data SID</li> <li>11. program legislasi</li> <li>12.kegiatan penyusunan tata ruang</li> <li>13. kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa</li> <li>14. kegiatan prekrutan perangkat Desa</li> </ol>

	<p>musyawarah Desa</p> <p>13. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa</p> <p>14. Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa</p> <p>15. Kegiatan pembangunan dan rehab kantor Desa</p> <p>16. Belanja modal</p> <p>17. Pengadaan Baju Dinas</p>	<p>13. Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa</p> <p>14. Kegiatan Pembangunan Dan Atau Rehab Kantor Desa</p> <p>15. Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa</p> <p>16. Kegiatan Perekrutan Perangkat Desa</p> <p>17. Pengadaan Baju Dinas</p> <p>18. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa</p>	<p>15. pengadaan baju dinas</p>
<p>Pembangunan Desa</p>	<p>1. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman</p> <p>2. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jembatan</p> <p>3. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Talud Saluran Pemb</p> <p>4. Pembangunan Gedung Paud/Tk</p> <p>5. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan</p> <p>6. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehata</p> <p>7. Pengadaan Peralatan Kesehatan Dasar Untuk Posyandu (Timbangan</p> <p>8. Pembangunan, Pemanfaatan Dan</p>	<p>1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan</p> <p>2. pembangunan dan pemeliharaan jembatan</p> <p>3. pembangunan dan pemeliharaan talud</p> <p>4. pengadaan tandn air</p> <p>5.pemanfaatan dan pemeliharaan infastruktur</p> <p>6. pemanfaatan dan pemeliharaan air minum</p> <p>7.pemanfataan dan pemeliharaan sanitasi.</p>	<p>1. pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan jalan</p> <p>2. pembangunan Gedung paud</p> <p>3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur</p> <p>4. pembangunan pemanfaatan dan pemeiharaan penguatan permodana BUMdesa</p>



	<p>Pemeliharaan Pendidikan Anak Usi</p> <p>9. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegi</p> <p>10. Pengadaan Peralatan Seni Tradisi (Misalnya Jaran Kepan, Rebana, D</p>		
<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>	<p>1. Dukungan kegiatan LPM</p> <p>2. dukungan kegiatan PKK</p> <p>3. belanja Modal</p> <p>4. peningkatan kapasitas dan sarana penunjang kelompok</p>	<p>1. kegitan pembinaan kerukunan umat beragama</p> <p>2. kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga</p> <p>3. kegiatan pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat</p> <p>4. kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa</p>	<p>1. dukungan kegitan LPM</p> <p>2. Dukungan kegiatan PKK</p> <p>3. pemberian insentif kader posyandu</p> <p>4. kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan</p> <p>5. peningkatan kapasitas dan sarana penunjang kelompok</p>
<p>Pembinaan Masyarakat Desa</p>	<p>1. kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama</p> <p>2. kegiatan pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat</p>	<p>1. Belanja dukungan LPM</p> <p>2. Dukungan kegiatan PKK</p> <p>3. Pemberian insentif kader posyandu</p> <p>4. kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan</p> <p>5. peningkatan kapasitas dan sarana penunjang kelompok</p> <p>6. kegiatan pelatihan kuliner</p> <p>7. kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk pemuda</p> <p>8. kegiatan pelatihan paralegal desa</p> <p>9. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil petanian</p>	<p>1. bidang pembinaan krukunan umat beragama</p> <p>2. kegiatan pembuatan saran dan prasaranan olahraga</p>

		10. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga 11. pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa 12. kegiatan sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan	

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dilapangan perencanaan program dan realisasi anggran persemester di Desa Tanjung, Teniga dan Malaka pada tahun 2017 telah berjalan sebagai mana mestinya namun program yang dipaparkan diatas Desa lebih fokus pada pembangunan infrastruktur atau fisik yang mencapai 85%. Pertanggungjawaban program kepada masyarakat telah dilakukan sebagai mana mestinya oleh Pemerintah Desa dengan memaparkan program di berbagai sudut Desa, namun prencanaan program ini masih belum didukung oleh implementasi yang baik oleh Pemerintahan Desa yang dimana kita tahu program fisik sangat mudah di mainkan dan ini pun belum dikatakan optimal dalam realisasi program.

Jika di cermati dari daftar usulan yang merupakan ruh dari RPJM dari ke tiga Desa, dilihat dari sini program yang dicanangkan oleh Desa Tanjung dan Desa Teniga sangat baik, Desa Teniga disini sangat rinci dalam program namun saat realisasi program sangat tidak optimal itu dakatan oleh salah satu tokoh Desa Teniga sekaligus mantan kepala Dusun yaitu Bapak Yusuf :

“sejauh ini program yang direncanakan memang sangat baik dengan melakukan musrembang Dusun dan Desa namun Desa teniga lebih fokus pada pembangunan fisik saja yang dimana pada pelaksanaannya banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek, seperti tidak ada hitungan bulan proyek fisik banyak yang cepat rusak”(wawancara tanggal 7 April 2018 jam 11 WITA)

Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Tanjung dan Desa Teniga masing-masing terdiri dari 4 bidang yang menaungi program program yang disusun dalam RKPDes kedua Desa tersebut, sedangkan Desa Malakukan tidak jauh berbeda dengan Desa Tanjung dan Teniga dengan memiliki perencanaan yang baik namun

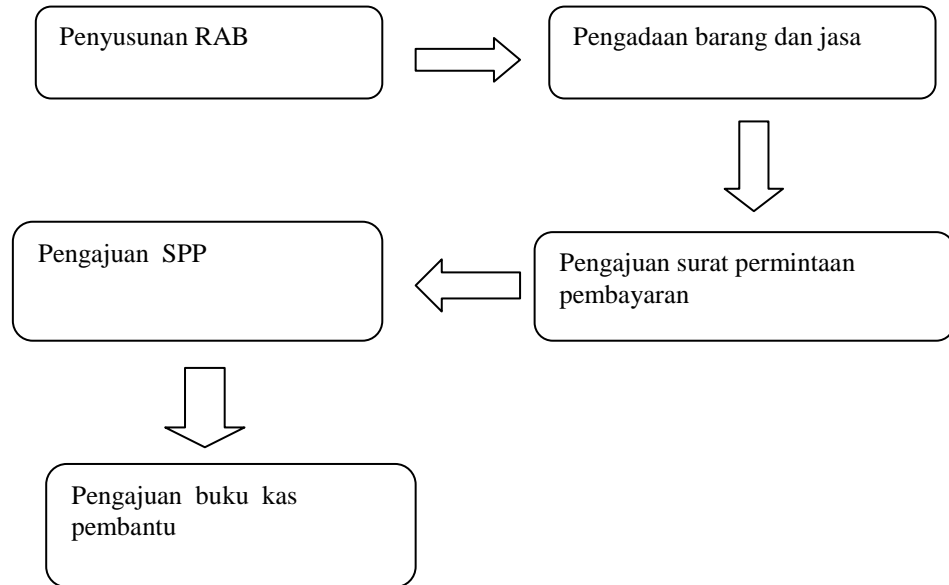
perencanaan yang baik tidak akan berdampak baik ketika saat pelaksanaan program terjadi kesalahan atau tidak optimal kinerja dari peng eksekusi program, dari hasil obeservasi dan melihat data kecamatan dan BPMD realisasi program yang baik jatuh kepada Desa Tanjung dengan ketepatan waktu dalam pertanggung jawaban.

### **V.1.2 Pelaksanaan Program**

Dalam pelaksanaan program dana Desa merupakan implementasi dari setiap rangkaian program terkait dengan perencanaan program yang telah tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Saat dokumen RPJM Desa dan RKP Desa selesai maka setiap Desa harus memiliki atau membuat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), saat APBDesa telah disahkan maka pelaksanaan kegiatan Desa akan melewati beberapa tahapan pelaksanaan dana Desa meliputi (1.) Penyusunan RAB (2) Pengadaan barang dan jasa (3). Pengajuan SPP (4).pembayaran dan (5). Pengajuan pembuatan kas buku kegiatan. Berikut gambar rangkaian dari pelaksanaan tahapan kegiatan Desa :

Gambar 3.3

Tahapan Pelaksanaan Dana Desa



Dilihat dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan program yang berkaitan dengan dana Desa diawali dengan penyusunan RAB, tapi sebelum menyusun RAB biasanya ada survei harga barang dan jasa dari tim penyusun serta di pastikan kembali tersedianya yang dibutuhkan dalam kaitan kegiatan pembangunan Desa. Berdasarkan RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan rencana teknis dari pengerjaan kegiatan yang ada dilapangan, kaur/Kepala seksi memproses atau memfasilitasi pengadaan barang dan jasa guna menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupu di pihak ketigakan, sedangkan Kepala Seksi sebagai koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai

dengan prosedur dan tata cara yang berlaku. Prosedur dan tata cara ditetapkan melalui (1) penyerahan dokumen SPP oleh Kepala Seksi atau Kaur kepada Kepala Desa, (2) pembayaran yang dilakukan oleh bendahar sesuai dengan SPP (3) pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atas pengeluaran yang terjadi. Selanjutnya kepala Seksi/Kaur/Pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Desa.

Hasil dari observasi peneliti dilapangan menunjukan bahwa dari ke tiga desa yang diteliti dapat dijelaskan bahwa di Desa Teniga pelaksanaan program kalau dilihat dari pertanggungjawaban administrasi sangat sesuai dengan prosedur sama halnya dengan Desa Tanjung dan Malaka yang pertanggung jawaban secara administrasi cukup baik dengan system SESKODES yang diterapkan pertanggungjawaban secara administrasi sangat dimudahkan dengan sistem ini yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SESKODES). Ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban dari ketiga Desa tersebut namun khusus Desa Malaka karna perangkat Desa masih belum memahami aplikasi Siskudes maka ada pedampingan khusus oleh BPMD Kabupaten Lombok Utara. Namun terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan masih banyak kekurangan. Ini senada dengan hal yang disampaikan oleh Kepala Dinas BPMD kabupaten Lombok Utara H,M. Holidi, menyatakan bahwa

“Pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Lombok Utara khususnya di Desa Tanjung, Teniga dan Malaka pada umumnya secara pertanggungjawaban administrasi cukup baik dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun harus dikatakan pelaksanaann program juga banyak yang belum maksimal secara 100% dan ini menjadi evaluasi kita bersama agar masyarakat Desa merasakan atas program yang kita eksekusi” ( wawancara tanggal 11 april 2018 Pukul 10:00 pagi WITA)

Desa Tanjung dan Desa Teniga terletak di satu kecamatan yang dimana Desa Tanjung terletak dipusat kota sedangkan Desa Teniga terletak di pegunungan melihat letak geografis menguntungkan Desa Tanjung yang terletak di pusat kota dan pelaksanaan program khususnya pada pembangunan Desa dapat di katagorikan dengan baik, salah satu faktor pendukung adalah infrastruktur memadai sehingga mudah diakses oleh kendaraan yang mengangkut material dan biaya ongkos bangunan juga terbilang murah serta belanja barang dan jasa di Desa Tanjung yang menjadi pusat Kota dibandingkan dengan Desa Teniga yang di pegunungan dan Desa Malaka di daerah pesisir kecamatan Pemenang.

Desa Teniga yang terletak di pegunungan dengan jarak tempuh satu jam dari pusat kota membuat peningkatan biaya dalam pembangunan Desa dan APBD yang cenderung hampir sama, jadi pembangunan infrastruktur agak lebih mahal dari Desa tanjung yang di pusat kota dan akses mobilitas yang mudah, beda dengan Desa Teniga yang harus mengeluarkan dana tambahan dalam pengadaan barang dan jasa yang diakibatkan jarak tempuh ke arah pegunungan. Menurut ketua BPD Desa Teniga Rusmin Nuriadin S.Pd.i

“Desa Teniga ini berbeda pembangunan fisik dengan Desa lain, kendala kami di Desa Teniga adalah dengan posisi di pegunungan biaya barang dan jasa berbeda dengan di kota sedangkan APBDes yang cenderung sama membuat kami secara infrastruktur ketinggalan dengan Desa lain.”(wawancara tanggal 12 April 2018 Pukul 13:00 Wita)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada pelaksanaan program kegiatan di Desa Teniga masih berhadapan dengan kendala letak geografis yang dipegunungan dengan peningkatan biaya barang dan jasa, hal ini di titik beratkan pada tidak adanya penjualan barang dan jasa di Desa Teniga agar kos anggaran untuk pembangunan infrastruktur Desa lebih murah sedangkan program pemberdayaan masyarakatpun harus menjadi prioritas seperti amanat dari UU Desa No 6 tahun 2014.

## **V.2 Akuntabilitas Kebijakan**

Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) merupakan salah satu dari unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban Dana Desa khususnya di Desa Tanjung Desa Teniga dan Desa Malaka, untuk melihat bentuk kebijakan yang di buat oleh pemerintahan Desa. Disisi lain lembaga publik khususnya Pemerintahan Desa harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan pertimbangan dampak dimasa depan. Karena itu dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut dan kenapa kebijakan itu dilakukan.

Akuntabilitas memiliki pengertian bagaimana alokasi dana Desa ini disalurkan dalam bentuk barang dan jasa untuk kepentingan umum. Menurut Andre (2015) Akuntabilitas dana Desa tidak semata-mata



bagaimana dana ini tersalurkan kemasyarakat Desa,tapi lebih jauh adalah bagaimana dan Desa bermanfaat bagi masyarakat Desa yang tentunya menjadi sasaran utama dalam menegemen Dana Desa. Oleh karan itu, dalam pemanfaatan Dana Desa hendaknya memfasilitasi adanya partisipasi dan intraksi dari masyarakat Desa hingga dampak baiknya sampai kepada masyarakat Desa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Desa Tanjung pada tahun 2017 menerima Dana Desa yang bersembur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian ditransfer ke rekening Desa sebesar 1.064.260.000 sementara yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 1.424.364.000 dan dana Desa dari BHPR 202.800.000 jika ditotal angrgran yang di transfer ke Desa sebesar 2.691.424.000,00.

Desa Teniga pendapatan transfer dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) ditahun 2017 sebesar 922.538.000 sementara Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersmuber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 1.161.172.000 dan pendapatan dari BHPR sejumlah 157.828.000 jika ditotalkan maka sejumlah 2.241.538.000,00. Sedangkan Desa Malaka mendapatkan pagu anggaran sebesar 2.653.173.000,00 dijumlahkan dari ADD,DD dan BHPR. Selanjutnya penggunaan Dana Desa tahun 2017 di Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka bisa dilihat di tabel bawah ini.



Tabel 4.3

## Penggunaan dan Realisasi anggaran Desa Tanjung Tahun 2017

Desa	Bidang	Kegiatan	Jumlah Penerima	Realisasi anggaran
Desa Tanjung	Bidang penyelenggaran Pemerintahan Desa	1. pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa	10.200.000,00	10.100.000,00
		2. kegiatan oprasional pemerintah Desa	8.000.000,00	7.800.000,00
		3. kegiatatan oprasional badan permusyawarahan Desa	2.750.000,00	2.750.000,00
		4. kegiatan pengelolaan data SID	24.200.000,00	24.100.000,00
		5. program legislasi Desa	2.000.000	1.900.000
		6. kegiatan penyelenggaran perencanaan Desa	5.390.000,00	5.290.000,00
		7. kegiatan pembangunan atau rehab kantor Desa	26.000.000,00	24.000.000,00
		8. kegiatan prekrutan perangkat Desa	3.610.000,00	3.410.000,00
		9. kegiatan pengukuhan perangkat Desa	3.200.000,00	3.100.000,00
		10. pengadaan baju dinas	1.380.000,00	1.280.000,00
	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	- Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (R	68.591.000,00	68.391.000,00

		- Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jembatan	80.765.850,00	80.565.850,00
		- Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Talud Saluran Pemb	106.319.000,00	106.219.000,00
		- Pembangunan Gedung Paud/Tk	98.450.900,00	98.150.900,00
		- Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	9.700.500,00	9.600.500,00
		- Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehata	65.208.450,00	65.008.450,00
		- Pengadaan Peralatan Kesehatan Dasar Untuk Posyandu (Timbangan	14.052.000,00	13.052.000,00
		- Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Pendidikan Anak Usi	18.000.000,00	18.000.000,00
		- Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegi	19.055.600,00	19.000.600,00
		- Pengadaan Peralatan Seni Tradisi (Misalnya Jaran Kepan, Rebana, D	37.750.000,00	37.750.000,00
	Bidang pemberdayaan masyarakat	1. Dukungan kegiatan LPM	14.287.000,00	14.187.000,00
		2. Dukungan kegiatan PKK	38.236.000,00	38.036.000,00
		3. Belanja Modal	6.500.000,00	6.400.000,00
		4. Peningkatan kapasitas dan sarana penunjang kelompok	8.750.000,00	8.550.000,00
	Bidang pembinaan masyarakat	1. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	12.668.000,00	12.568.000,00

		2. Kegiatan pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat	8.482.000,00	8.282.000,00
Sumber Dana PBH	Jumlah			

Dari pemaparan tabel diatas penulis menganalisis Belanja Pegawai menjadi yang tertinggi yang bersumber Dana dari PBH yang didapat oleh pemerintah Desa Tanjung jumlah dana PBH Desa Tanjung adalah 245.808.300,00. pada Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa mengalokasikan dari alokasi dana Desa sejumlah 601.421.900,00 yang penggunaan dana tertinggi pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang menyerap anggaran dana Desa sejumlah 517.839.000,00 sedangkan dibidang pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa mengalokasikan dana dari PBH sejumlah 61.273.000,00 yang dimana kegiatan dukungan PKK pealing tinggi untuk di anggarkan dengan sejumlah 38.236.000,00. Serta pada bidang pembinaan masyarakat Desa, pemerintah mengalokasikan 21.150.000 pada dana PBH dan kegiatan tertinggi pada anggaran adalah pembinaan kerukunan umat beragama, berikut adalah pemaparan tabel penggunaan anggaran pada Desa Tanjung yang bersumber dari Dana Desa dan PBH.

Tabel 4.4  
Penggunaan dan Realisasi Anggaran Desa Teniga

Desa	Bidang	Kegiatan	Jumlah	Realisasi Anggaran
Desa Teniga	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. pemabayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa	323.400.000	323.300.000
		2. pembayaran penghasilan tambahan kepala Desa		
		3. pembayaran tunjangan kepala Desa	15.900.000	15.800.000
		4. pembayaran BPD	52.800.000	52.700.000
		5. pembayaran insentif pelayan masyarakat	61.080.000	61.000.000
		5. kegiatan oprasional pemerintah Desa	73.200.000	73.100.000
		6. kegiatan operasional BPD	48.933.000	48.903.000
		7. Kegiatan study banding dan bimtek kepala Desa	31.185.000	31.175.000
		8.kegiatan bimtek sekdes dan prangkat Desa	19.000.000	19.000.000
		9. kegiatan pengelolaan data SID	33.000.000	33.000.000
		10. program legislasi	21.461.000	21.401.000
		10.kegiatan penyusunan tata ruang	5000.000	5000.000
		11. kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa	4.920.000	4.820.000
		12. kegiatan pengadaan sarana dan prasaran kantor Desa	20.622.000	20.422.000
13. kegiatan prekrutan perangkat Desa	50.000.000	50.000.000		
14. pengadaan baju dinas	122.168.000	120.168.000		
		6.500.0000	6.400.0000	
	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan	488.766.000,00	488.566.000,00
		2. pembangunan dan pemeliharaan jembatan	52.218.000,00	52.018.000,00
		3. pembangunan dan pemeliharaan talud	443.118.000,00	443.018.000,00
		4. pengadaan tandn air	1.180.000,00	1.100.000,00
		5.pemanfaatan dan pemeliharaan infastruktur	25.925.000,00	25.825.000,00
		6. pemanfaatan dan pemeliharaan air minum	40.000.000,00	40.000.000,00
		7. pemanfataan dan pemeliharaan sanitasi.		

	Bidang pembinaan Masyarakat		51.900.000,00	51.800.000,00
			19.050.000,00	19.000.000,00
		1. kegitan pembinaan kerukunan umat beragama	0.00	0.00
		2. kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga		
		3. kegiatan pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat		
		4. kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa	89.064.000,00	89.004.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Belanja dukungan LPM	2.560.000,00	2.500.000,00
		2. Dukungan kegiatan PKK	5.086.000,00	5.006.000,00
		3. Pemberian insentif kader posyandu	45.000.000,00	44.900.000,00
		4. kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan	5.104.000,00	5.004.000,00
		5. peningkatan kapasitas dan sarana penunjang kelompok	4.462.000,00	4.362.000,00
		6. kegiatan pelatihan kuliner	3.000.000,00	2.900.000,00
		7. kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk pemuda	2.823.000,00	2.623.000,00
		8. kegiatan pelatihan paralegal desa	2.500.000,00	2.400.000,00
		9. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	13.341.000,00	13.241.000,00
		10. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga	3.066.000,00	3.000.000,00
		11. pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa	3.000.000,00	2.900.000,00
		12. kegiatan sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan	7.500.000,00	7.400.000,00
Jumlah				







Dari tabel diatas terdapat pelaksanaan anggaran dari dana Desa pada tahun 2017, yang dimana penggunaan dana Desa Teniga pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sejumlah 948.169.000 dan serapan anggaran tertinggi pada penyelenggarakan dana Desa adalah pada pengadaan sarana dan prasarana perangkat Desa dengan jumlah dana sebesar 122.168.000, lalu pada bidang pembangunan Desa, pemerintah Desa menganggarkan dari Dana Desa sejumlah 1.158.509.631 , dari pembangunan Desa kegiatan yang paling tinggi dianggarkan adalah pada pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan yang menelan anggaran sejumlah 459.853.000 sedangkan pada anggaran yang paling rendah pada kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan air minum dengan anggran 40.000.000 sedangkan pada bidang pembinaan masyarakat pemerintah Desa menganggarkan 186.140.000 yang bersumber dari Dana Desa, pada bidang ini anggaran kegiatan paling tinggi adalah kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dengan jumlah anggaran 51.900.000 sedangkan kegiatan yang menelan paling sedikit anggaran dibidang pembinaan ialah kegiatan pengadaan saran dan prasarana olah raga, sementara pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa menganggarkan bersumber dari dana Desa sejumlah 97.442.000 yang dimana serapan anggaran tertinggi pada pemberian insentif kader posyandu dengan sejumlah 45000.000 sedangkan yang terendah anggaran pada pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan paralegal Desa dengan anggaran 2.500.000, demikian atas pemaparan tabel pada pelaksanaan anggran 2017 pada Desa Teniga.

Tabel 4.5

## Penggunaan dan Realisasi Anggaran Desa Malaka

Desa	Bidang	Kegiatan	Jumlah	%
Desa Malaka	Bidang Penyenggaran Pemerintahan Dsea	1. pemabayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa	372.900.000	372.800.000
		2. pembayaran penghasilan tambahan kepala Desa	67.200.000	67.100.000
		3. pembayaran tunjangan kepala Desa	61.000.000	61.000.000
		4. pembayaran BPD	67.200.000	67.100.000
		5. pembayaran insentif pelayan masyarakat	97.521.000	97.321.000
		6. kegiatan oprasional pemerintah Desa	24.514.000	24.314.000
		7. kegiatan operasional BPD	19.000.000	19.000.000
		8. Kegiatan study banding dan bimtek kepala Desa	33.000.000	33.000.000
		9.kegiatan bimtek sekdes dan prangkat Desa	19.800.000	19.600.000
		10. kegiatan pengelolaan data SID	5000.000	5000.000
		11. program legislasi	5.000.000	5.000.000
		12.kegiatan penyusunan tata ruang	25.000.000	25.000.000
		13. kegiatan penyelenggaran perencanaan Desa	47.039.000	47.009.000
		14. kegiatan prekrutan perangkat Desa	11.270.000	11.200.000
		15. pengadaan baju dinas		
	Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa		103.390.000,00	103.380.000,00
		1. pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan jalan	29.415.000,00	29.405.000,00
		2. pembangunan Gedung paud		
		3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur	101.135.000,00	101.115.000,00
		4. pembangunan pemanfaatan dan pemeiharaan penguatan permodana BUMdesa	100.000.000,00	100.000.000,00

	Bidang pemberdayaan Masyarakat		2.077.000,00	2.017.000,00
		1. dukungan kegitan LPM	3.050.000,00	3.000.000,00
		2. Dukungan kegiatan PKK	1.27.800.000,00	1.27.700.000,00
		3. pemberian insentif kader posyandu	0,00	0,00
		4. kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan		
		5. peningkatan kapasitas dan sarana penunjang kelompok	13.815.000,00	13.615.000,00
	Bidang Pembinaan Masyarakat	1. bidang pembinaan krukunan umat beragama	10.000.000	10.000.000
		2. kegiatan pembuatan saran dan prasaranan olahraga	68.120.000	66.120.000
Jumlah				



Dalam pemaparan tabel diatas anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa berjumlah 979.015.000 yang jumlah anggaran terbesar pada kegiatan pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan prangkat Desa dengan jumlah 372.900.000 yang menjadi anggaran tertinggi dibandingkan dengan Desa Tanjung dan Desa Teniga, sedangkan pada anggaran paling sedikit pada kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa yang jumlah anggaran sejumlah 2500.000, dan pada bidang pembangunan Desa jumlah serapan kegiatan pada bidang pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dengan jumlah anggaran 103.390.000 sedangkan anggaran paling rendah pada kegiatan pembuatan gedung Paud dengan jumlah 29.000.000, serta pada bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa Malaka menggarakan dari dana Desa yang cukup besar. Anggaran paling tinggipun pada kegiatan pemberian insentif kader Posyandu yang jumlahnya 127.000.000 sedangkan kegiatan anggaran terendah pada dukungan kegiatan LPM yang sejumlah 2076.000, sedangkan pada bidang pembinaan masyarakat dana serapan terendah pada kegiatan kerukunan pembinaan umat beragama sejumlah 10.000.000 dan serapan anggaran tertinggi pada kegiatan pembuatan sarana dan prasarana olah raga sejumlah 68.120.000.

Dana Desa yang bersumber dari APBN yang di transfer oleh pemerintah pusat kepada Desa untuk dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan Desa, dana Desa ini kemudian dijalankan oleh pemerintah Desa Tanjung pada tahun 2017 adalah penggunaan pada pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan talud saluran pembangunan air limbah yang menghabiskan anggaran sebesar 106.319.000,00 yang menjadi pengeluaran Desa Tanjung pada termin ke satu, hal ini menjadi

prioritas karna langsung menjadi permintaan masyarakat yang dimana ini keluhan langsung dari masyarakat Desa Tanjung.

Disisilain yang menjadi besaran anggaran pada pilihan kebijakan oleh Desa Tanjung adalah pelaksanaan pembangunan Desa yang menyerap anggran sejumlah 517.893.300,00 hal ini dikarenakan menjadi prioritas pembangunan Desa di Desa tanjung untuk membangun infrasrtuktur, besarnya anggaran ini diharapkan akan memberikan dampak baik kepada Desa dan masyarakat agar pembangunan Desa diraskan oleh masyarakat Desa Tanjung, sedangkan Desa Tenigapun 80% dari APBDes adalah pembangunan fisik,yang mejadi tujuan dari kepala Desa adalah pemerataan pembangunan Desa di Desa Teniga, berikut pernyataan kepala Desa Teniga bapak Maswandi ;

“di APBDes 2017 kami memprioritaskan adalah pembangunan Desa dari segi fisik yaitu pemerataan infrasrtuktur di Dusun-dusun seluruh Desa Teniga, agar masyarakat merasakan hasil kerja kami, dan ini temtu hasil dari musrebang Dusun dan Desa” (wawancara tanggal 12 April 2018 Pukul 09:00 WITA).

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa Teniga menunjukkan bahwa pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa fokus terhadap pembangunan Desa dibidang infrastruktur yang menjadi skala prioritas Desa. Namun pada pelaksanaannya masih banyak terjadi permasalahan, asumsi masyarakat terhadap pembangunan Desa yang memprioritaskan infrastruktur langsung ikut mengawasi pengerjaan yang dilakukan pihak ketiga, hasil laporan masyarakat banyak pekerjaan yang tidak beres itu dikarenakan baru sebulan pengerjaan selesai banyak terjadi masalah seperti rusaknya sebagian pengerjaan fisik yaitu rabat jalan dan pembuatan drenase namun pertanggungjawaban secara administrasi dari menurut kecamatan ialah baik dan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan.



Sedangkan di Desa Malaka yang terletak didaerah pesisir yang menajdi andalan wisata kabupaten Lombok Utara memiliki prioritas pilihan kebijakan ialah di segi infrastruktur juga hal ini diiyakan oleh Sekdes Malaka, besar anggranpun 80% untuk infrastrukur dari APBDDes, namun pada 2017 Desa Malaka telat dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan Desa ke tingkat kecamatan dan BPMD kabupaten Lombok Utara hal ini disebabkan kekeliruan input data dari aplikasi sistem keuangan Desa oleh staf Desa yang menyebabkan keterlambatan dalam pertanggungjawaban, hasil wawancara dengan kepala BPMD Kabupaten Lombok Utara bapak H.M.Holidi mengatakan tentang keterlambatan pertanggungjawaban berikut hasil wawancara :

“memang dibenarkan sampai saat ini dibulan April 2018 Desa Malaka belum melakukan pertanggungjawaban hal ini disebabkan karna staf dari pemerintahan Desa Malaka masih belum memahami aplkasi system keuangan Desa tentu untuk menyikapi permasalahan ini kami selaku Pembina Desa akan melakukan pelatihan lagi terhadap staf di Desa malaka agar tidak ada kekeliruan lagi dalam meng input” (wawancara tanggal 19 april 2018 pukul 10:00 WITA)

Dari penjelasan diatas masih banyak permasalahan dalam kontek pilihan kebijakan program dan pertanggungjawaban, melihat kondisi ini perlu pembinaan secara berkala dalam menentukan kebijakan program Desa oleh BPMD selaku dinas yang menaungi Desa,dan agar sesuai dengan amanah UU Desa No 6 Tahun 2016.

Pada tabel pelaporan penggunaan dana Desa di atas bisa kita lihat bahwa banyak anggran yang tidak bisa direalisasikan seperti Desa Teniga pada program bidang pelaksanaan pembangunan Desa di kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sanitasi dan pembangunan pemeliharaan permodalan BUMDesa dengan anggran total 96.000.000,00 tidak dapat dieksekusi oleh pemerintah Desa Teniga. Sedangkan di Desa Malaka terdapat program yang tidak dapat anggaran seperti di

bidang pemberdayaan masyarakat tentang pelatihan penyuluhan. Melihat anggaran ke tiga Desa tersebut memang fokus terhadap pembangunan infrastruktur sehingga program pemberdayaan hanya 20% dari total APBDesa.

### **V.3. Akuntabilitas Proses**

Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dipruntukan untuk Desa, ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. fungsi dari APBD yang khususnya dibidang alokasi memberi penjelasan bahwa APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pemborosan sumber daya, mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sedangkan secara distribusi jelaskan bahwa APBD dalam mendistribusikan harus mengedepankan rasa keadilan dan kepatutan.

Sehingga ketika kita melihat kedua fungsi ini maka dapat membuat masyarakat Desa lebih sejahtera. Karna pada hakekatnya fungsi alokasi ialah pemanfaatan dana daerah yang diberikan kepada Desa untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sedangkan fungsi dari distribusi yang mengharuskan pemanfaatan dana Desa atau daerah memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, yang artinya pemanfaatan dana Desa harus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan dan digunakan untuk kebutuhan mensejahterakan masyarakat Desa. Berikut tabel indikator proses akuntabilitas.

Tabel 4.6

## Indikator proses Akuntabilitas Desa

Indikator	Desa Tanjung	Desa Teniga	Desa Malaka
Adanya kepatuhan terhadap prosedur	Desa Tanjung pada anggaran tahun 2017 secara administrasi pertanggungjawaban keuangan Desa sejauh ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal ini hasil analisis penulis dilapangan, yang dimana sejauh ini proses pengerjaan pertanggungjawaban keuangan Desa dilakukan secara sistematis karna penguasaan tupoksi dari perangkat Desa Tanjung, asas transparansi anggaran pun sudah dilakukan oleh pemerintah Desa namun masih belum maksimal.	Pengelolaan keuangan Desa pada tahun 2017 sejauh ini bisa dikatakan baik secara administrasi, karna pada tahun sebelumnya pemerintah Desa Teniga terbilang buruk dalam pengelolaan keuangan Desa, pada tahun 2017 pemerintah Desa dalam pertanggungjawaban menjadi peringkat ketiga dilihat dari ketepatan waktu dan proses pengerjaan pertanggungjawaban keuangan Desa, melihat kondisi dilapangan proses yang dilakukan Desa Teniga sudah sesuai dengan prosedur dan arahan dari BPMDes Kabupaten Lombok Utara.	Desa malaka pada pengelolaan anggaran tahun 2017 memiliki hambatan, karna pada proses pembauatan pertanggungjawaban ada kesalahan yang dibuat oleh operator Desa dan membuat keterlambatan yang cukup lama dalam pertanggungjawaban keuangan Desa, hal ini disebabkan karna kesalahan pengimputan data keuangan Desa pada perbidang, sehingga Desa Malaka tidak bisa mengikuti kepatuhan terhadap prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah yaitu pada BMPDes Kabupaten Lombok Utara.
Adanya pelayanan	Dalam tingkat pelayanan publik, pemerintah Desa Tanjung	Dari sisi pelayanan yang responsive pemerintah Desa	Dari sisi pelayanan yang responsive, bisa dikatakan pemerintah Desa belum

<p>publik yang responsive</p>	<p>menerapkan pelayanan publik yang responsive, hal ini bisa dilihat ketika adanya pengaduan masyarakat ke pemerintah Desa, kasi pada bidang pelayanan Desa sangat responsive terhadap pengaduan warga Desa, seperti saat pengurusan pembuatan sertifikat tanah, perangkat Desa di bidang pelayanan sangat baik dalam melayani masyarakat Desa.</p>	<p>Tenaga masih belum maksimal, hal ini disebabkan kinerja dari perangkat Desa dibidang pelayanan publik kurang cekatan dalam memberikan pada masyarakat, Faktor penyebab juga karna staf Desa dibidang pelayanan yang tua, sehingga agak lambat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.</p>	<p>responsive terhadap pelayanan untuk masyarakat, seperti pengaduan-pengaduan yang dilakukan masyarakat , pelayanan pemerintah Desa agak lambat dalam merespon, hal ini disebabkan kualitas staf perangkat Desa yang masih rendah, dan rata-rata yang menjadi perangkat Desa yang berumur tua, seharusnya ada penyegaran dalam bidang pelayanan publik di Desa Malaka yang diisi oleh kalangan muda yang memang menguasai standar pelayanan minimum.</p>
-------------------------------	---	---	---

Mengenai proses akuntabilitas pengelolaan pemerintahan Desa sejauh ini di anggap baik di Desa Tanjung, karna pada ranah pelayanan publik Desa memakai program satu pintu yang sangat efisiensi waktu dan tidak memungut biaya, serta dalam pengelolaan keuangan desa prangkat Desa Tanjung dikatakan baik, hal ini bisa diukur dari pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Tanjung, dalam pelaksanaan pembangunan Desa di program ini pemerintah Desa Tanjung menganggarkan anggran sebesar 295.880.600,00 dengan jumlah realisasi anggran 292.999.600,00 di anggaran belanja tahun 2017, tahapan pertanggung jawaban sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sesuai wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Budiawan SH ;

“pemerintah Desa tanjung menganggarkan anggaran yang cukup besar disektor pembangunan, karna kami ingin masyarakat Desa merasakan pembangunan, dan dari sisi pertanggungjawaban kinerja pemerintah Desa sejauh ini mengedepankan SOP yang sudah ditentukan oleh BPMD KLU serta mengdepan standar pelayanan yang baik dan rensponsif bagi masyarakat Desa Tanjung”(wawancara 7 April 2018 pukul 09:00 Wita)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pemerintahan Desa Tanjung sudah melakukan pertanggungjawaban kegiatan di sektor pembangunan seacara baik ini bisa dilihat dari realisasi anggaran, dengan kata lain capain kegiatan berjalan dengan maksimal.

Sedangkan Desa Teniga dalam proses akuntabilitas, melihat dari sisi program yang dianggarkan di tahun 2017 serapan anggaran terbanyak pada sektor pembangunan Desa yang mencapai serapan anggaran sejumlah 1.158.509.631,00 . pada proses pertanggungjawaban pemerintah Desa Teniga tergolong baik, karna pelaporan keuangan sudah sesuai dengan prosedur dan batas waktu yang telah

ditentukan. Dalam proses pelayanan public masih ada kekurangan karena staf dibidang pelayanan public masih model lama dan kekurangan, seperti pelayanan publik pembuatan sertifikat tanah gratis bagi warga yang membuat staf Desa agak kewalahan sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pembuatan sertifikat tanah warga. Pada wawancara dengan salah satu anggota BPD Desa Teniga yaitu bapak Agus Rahman ;

“sejauh ini dalam proses pertanggungjawaban keuangan sudah mulai membaik, kalau di bandingkan dengan pertanggungjawaban di tahun 2016 kita diurutan no 10 dari 12 Desa yang terburuk, sedangkan di tahun ini menjadi urutan ke tiga sehingga ini adalah kemajuan bagi kami, namun memang pada sektor pelayanan publik masih kurang karna terkait staf Desa yang terbatas”(wawancara 5 April 2018 pukul 09:00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita jelaskan bahwa penggunaan anggaran Desa yang bersumber dari APBN dan APBD yang di anggarkan melalui APBDes proses akuntabilitas di Desa Teniga sejauh ini cukup baik, namun di sektor pelayanan public masih belum maksimal hal ini terkait minimnya pegawai yang ada di Desa Teniga sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

Desa Malaka yang memiliki sumber dana dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggran pendapatan Belanja Daerah yang di transfer ke rekening Desa sebesar 2.653.173.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan baik dari segi pembangunan Desa maupun pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan skala prioritas penggunaan dana Desa, untuk pembangunan Desa pemerintah Desa Malaka menganggarkan sejumlah 2.52.605.000,00. Dalam hal ini pemerintah Desa Malaka dituntut untuk menggunakan anggran sesuai dengan waktu dan biaya yang telah ditentukan. Namun secara proses pertanggungjawaban di realisasi anggaran ada beberapa kegiatan yang belum bisa dieksekusi hingga menjadi silva Desa. Oleh

karena itu perlunya perencanaan yang matang dalam penyusunan program agar pada proses pelaksanaan bisa di pertanggungjawabkan, menurut bapak Jasman Ketua BPD desa Malaka tahun 2017/2018 menyatakan bahwa :

“penggunaan anggaran di tahun 2017 belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan ada beberapa program yang sudah di anggarkan tidak bisa di eksekusi tentu ini akan menjadi evaluasi bagi Desa malaka kedepan agar lebih baik, dalam pertanggungjawaban keuanganpun Desa Malaka melakukan kesalahan yang salah menginput data keuangan di SESKUEDES sehingga dapat teguran oleh BPMD KLU akibatnya di tahun 2018 Desa Malaka terlambat dlam pertanggungjawaban keuangan Desa ”(wawancara 8 April 2018 pukul 10:00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD di Desa Malaka dari segi kegiatan belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan adanya beberapa program yang sudah di anggarkan namun tidak dieksekusi oleh pemerintah Desa Malaka. Tidak bisa kita pungkiri dalam melaksanakan suatu kegiatan memang tidak mudah, perlu di tolong oleh kualitas SDM yang mempunyai di Desa Malaka agar segala bentuk program yang sudah dianggarkan bisa di eksekusi dengan baik.

Proses akuntabilitas yang terjadi di tiga Desa tersebut bisa dikatakan baik namun ada beberapa yang menjadi kendala. Desa Tanjung bisa dikatakan dalam proses pertanggungjawaban anggaran dikatakan dengan baik, bagaimana proses kinerja yang sistematis dan operator yang memegang aplikasi system kuangan Desa bisa dikatakan mahir sehingga saat pembuatan SPJ pemerintah Desa tidak kelabakan seperti Desa yang lain, lalu pada kasus Desa Teniga pada tahun anggaran 2017 proses akuntabilitas dikatakan baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana Desa Teniga selalu kena teguran dari kecamatan dan BPMD Kabupaten Lombok Utara, penerapan kinerja dalam administrasi cukup baik karna PLT kepala Desa

Teniga memang cukup pengalaman dalam pertanggungjawaban anggaran, sehingga Desa Teniga ada peningkatan yang cukup baik dalam pertanggungjawaban dana Desa anggaran 2017, sedangkan Desa Malaka menjadi sorotan BPMD atas keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dana Desa oleh pemerintah Desa ke BPMD, hal ini disebabkan oleh kesalahan operator Desa dalam menginput data keuangan Desa ke system SISKUDES sehingga terjadinya keterlambatan, namun penyebabnya juga kualitas dari staf Desa yang masih kurang menguasai tupoksi dan harus ikut dalam pelatihan peningkatan skill.

#### **V.4. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum**

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum ini sangat berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan anggaran, karna pemerintahan yang jujur dan taat pada aturan yang berlaku akan mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum juga merupakan suatu proses untuk menghindari penyalahgunaan jabatan serta adanya kepatuhan hukum dan praturan lain yang notabnya disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik dan dalam menjalankan tugas. Oleh sebab itu system transparansi merupakan tolak ukur dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang telah dipercayakan pada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.



Tabel 4.7

## Indikator Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Indikator	Desa Tanjung	Desa Teniga	Desa Malaka
Kepatuhan pemerintah Desa Terhadap Hukum	Menganai kepatuhan terhadap legalitas dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan Desa, Desa Tanjung pada dasarnya telah mempertanggungjawaban segala pelaksanaan kegiatan yang di programkan sampai pada tingkat pelaporan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada, jenis kegiatan kemudian dikerjakan dan dilaporkan dengan mengacu pada peraturan Desa tentang prioritas penggunaan keuangan Desa. Dalam hal ini prioritas dari Desa Tanjung ialah pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.	Pengelolaan keuangan Desa yang sudah tertuang pada undang-undang Desa, pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa pada anggaran tahun 2017 sudah melakukan pertanggungjawaban dengan baik, hal ini dapat diukur dari ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban Desa, sejauh ini juga pemerintah Desa Teniga selalu patuh pada peraturan yang berlaku, seperti perbub ataupun peraturan Daerah. Di tahun 2017 juga membuktikan tidak adanya teguran dari pemerintah daerah yang sebelumnya pemerintah Desa Teniga menjadi sorotan karna selalu terlambat dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa.	Pengelolaan keuangan Desa Tahun 2017 oleh pemerintah Desa Malaka cukup besar, Desa Malaka adalah penghasil PAD terbesar kedua setelah Desa Gili Indah. Desa Malaka pada anggaran 2017 terlambat dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan Desa, hal ini disebabkan oleh kesalahan perangkat Desa dalam penginputan data dalam pembuatan SPJ, sehingga Desa Malaka dikatakan tidak patuh dalam kepatuhan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan Desa.

<p>Penghindaran pemerintah Desa terhadap korupsi dan kolusi</p>	<p>Dalam menjalankan pengelolaan keuangan Desa, pemerintah Desa mengedepankan transparansi penggunaan keuangan Desa, hal ini dilihat dari program yang dilakukan seperti pembuatan baleho didepan kantor Desa agar masyarakat memahami kemana saja arah penggunaan keuangan Desa pada tahun 2017, serta keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa, karna pemerintah Desa yang cukup responsive terhadap pengaduan masyarakat Desa.</p>	<p>Untuk penghindaran pemerintah Desa dari kegiatan korupsi dan kolusi, pemerintah Desa sejauh ini melakukan transparansi anggaran ke pada masyarakat Desa, walaupun belum bisa dikatakan masyarakat, karna kurangnya sosialisasi pemerintah Desa ke masyarakat, hingga memang tidak sepenuhnya masyarakat percaya terhadap pertanggungjawaban secara administrasi, karna kenyataan yang berbeda dirasakan dilapangan oleh masyarakat Desa</p>	<p>Secara aturan yang berlaku pemerintah Desa di haruskan untuk menginformasikan keuangan Desa yang dikelola kepada masyarakat, hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Desa menunjukkan alur keuangan Desa dan kegiatan Desa tahun 2017, Desa malaka memapangkan baleho yang berisi anggaran Desa yang dikelola, namun pada pelaksanaan program Desa, seperti pada bidang pembangunan Desa (fisik) kepala Desa menentukan agar dikerjakan oleh pihak ketiga.</p>
---	--	--	--



Mengenai legalitas dan kejujuran dalam penggunaan anggaran dana Desa, di Desa Tanjung pada dasarnya telah mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan kegiatan yang di programkan sampai pada tingkat pelaporan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada, jenis kegiatan yang kemudian dikerjakan dan dilaporkan dengan mengacu pada peraturan Desa tentang prioritas penggunaan dana Desa. Dalam hal ini prioritas dari Desa Tanjung ialah pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di lapangan, Desa Tanjung pada tahun 2017 dengan memiliki sumber daya manusia yang terbatas namun pada realisasi anggaran dapat dikatakan baik, karena sejauh ini hasil dari inpeksi yang dilakukan oleh inspektorat khususnya pada anggaran 2017/2018 menunjukkan belum adanya temuan terkait penyalahgunaan dana Desa. Disisi lain ada pembinaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan masyarakat Desa (BPMD) terkait pertanggungjawaban keuangan Desa.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh penulis dan meskipun tidak terdapat adanya temuan terkait penyalahgunaan Keuangan Desa, secara tranfaransi penggunaan keuangan Desa di Desa Tanjung menurut Bapak Adam Yahya selaku anggota BPD Desa Tanjung masih ada penyimpangan terkait dengan penggunaan dana Desa di Desa Tanjung karna tidak bisa diukur dari tranfaransi baleho yang di pampang di depan kantor Desa Tanjung seharusnya ada dipampang di setiap papan pengumuman yang ada di dusun-dusun, sedangkan di waktu yang berbeda penuis mewawancarai bendahara Desa Tanjung Ibu I Wayan Ratih.

“keterbukaan mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat menurut saya pemerintah Desa telah melakukan dengan maksimal, ini dilihat dari pelaporan atau pertanggungjawaban keuangan Desa yang sejauh ini sangat baik, karna tidak adanya teguran dari

inspektorat sejauh ini saat adanya pengauditan anggaran Desa”(wawancara tanggal 11 April 2018 pukul 10.00 Wita)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tahun 2017 di Desa Tanjung bisa dikatakan baik karna tidak ada indikasi penyalahgunaan secara administrasi namun secara transparansi masih harus ada penambahan papan informasi di setiap dusun- dusun yang ada di Desa Tanjung agar masyarakat melihat langsung rincian anggaran pembangunan Desa serta untuk mengukur tingkat kejujuran dalam penggunaan dana Desa.

Desa Teniga yang terletak di pegunungan memiliki keterbatasan SDM dalam mengelola Dana Desa , meskipun demikian pada tahun 2017 tahapan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teniga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah Daerah yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, karena untuk pencairan selanjutnya pemda Kabupaten Lombok Utara mewajibkan kewajibanya karena ini berkaitan dengan pencairan dana Desa berikutnya. Salah satu kendala yang dialami oleh Pemerintah Desa Teniga adalah di penggunaan dana Desa 2017 ada beberapa program yang tidak bisa direalisasikan yaitu pembuatan dan pemeliharaan sanitasi dan belanja modal untuk pengembangan BUM Desa serta pembelian alat kesninan, tiga program ini tidak bisa dieksekusi oleh pemerintah Desa Teniga. Adapun besaran anggran yang tidak bisa dieksekusi adalah sebagai berikut

Tabel 4. 8

## Anggaran yang menjadi silva Desa Teniga

<b>Jenis program</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi</b>	46.000.000
<b>2. Pembangunan dan pemeliharaan belanja Modal</b>	50.000.000
<b>3. Pengadaan alat kesenian</b>	19.176.000
<b>Total</b>	109.176.000

Sumber : laporan realisasi anggran Desa Teniga 2017

Berkaitan dengan anggaran yang sudah dipaparkan bahwa Desa teniga tidak bisa mengeksekusi tiga program yang akhirnya menjadi silva sejumlah 109.179.000 hal ini menjadi sorotan masyarakat Desa, menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Teniga yaitu bapak H.Mutamad mengatakan bahwa:

“Pemerintahan Desa Teniga memang masih memiliki kualitas SDM yang belum maksimal, banyak program yang terkadang dibisa mereka eksekusi dan yang merasa dirugikan adalah masyarakat, maka dariitu kami juga menyoroti kinerja BPD sebagai lembaga pengawas Desa terkait dengan ada beberapa program yang tidak bisa dieksekusi, penjelasan dari pihak Desa pun tidak menyenangkan hati, sehingga kami menarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa perlu evaluasi terkait kualitas SDM atau aparturnya”(wawancara tanggal 7 mei 2017 pukul 11 :00)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa harus adanya peningkatan kualitas SDM karna berpengaruh pada pengeksekusian program dan pertanggungjawaban anggran di Desa Teniga, dan mengedepankan asa tranfaransi anggaran agar bisa dikatakan pemerintahan Desa yang jujur dan akuntabel.

Sedangkan pemerintahan Desa Malaka yang terletak di sisi barat kabupaten Lombok utara yang mengelola anggaran Desa yang cukup besar dan penghasil PAD terbesar kedua setelah Desa Gili Indah. Desa Malaka pada tahun anggaran 2017

mendapatkan kendala yang cukup patal pada pertanggungjawaban keuangan Desa, sebabnya adalah ada kekeliruan pengimputan data anggaran melalui system keuangan Desa, akibatnya Desa Malaka terlambat dalam pertanggungjawaban anggaran di tahun 2018 yang mengakibatkan keterlamabatan juga pada transfer dana Desa dari pusat ke Desa Malaka. Saat turun dilapangan melihat kondisi kantor dan mewancarai Sekdes Desa Malaka

“terkait keterlambatan pertanggungjawaban dana Desa disebabkan oleh operator SISKUDES yang salah menginput data, sehingga pertanggungjawaban salah dan harus di ulang, inipun terjadi karna operator kami masih baru belajar dalam menginput data sehingga terjadi kekeliruan”

Adapun hasil wawancara diatas dapat kitalimpulkan memang harus ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemdes sehingga menambah keterampilan operator Sekdes di Pemerintahan Desa. Dalam hal ini Desa malaka tidak tepat waktu dalam melaporkan keuangan desa yang sudah dikelola selama setahun, dan memuncu persepsi-persepsi beragam dari kalangan masyarakat bahwa kinerja dari pemerintah Desa Malaka masih sangat kurang memuaskan masyarakat Desa.

Transparansi dalam penggunaan anggaran publik khususnya dana pemerintahan Desa harus bersinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan Pemerintahan Desa. Selain Peraturan Daerah hal yang harus di pahami oleh pemerintah Desa agar tidak salah dalam mengimplentasikan arti dari perda tersebut. Tahap ini bisa disebut tolak ukur keberhasilan dalam suatu kebijakan. Peran aktif dari masyarakat sangat penting sebagai kontroling Pemerintahan Desa dan juga mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan penggunaan anggaran

untuk kepentingan public pada pemerintah Desa yang sesuai dengan pasal 68 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Permasalahan di Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka terkait dengan pengelolaan dana Desa adalah ditahun 2017 peraturan daerah yang tidak sinkron dengan program yang sudah di anggarkan tahun sebelumnya, yang akhirnya pemerintah Desa mengubah di APBDes Prubahan untuk mengikuti aturan dan regulasi yang ada.

#### **V.5. Kepemimpinan Yang Berkemampuan**

Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi ialah memiliki konsep dan seni kepemimpinan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dan bisa mengarahkan anggota organisasi untuk bekerja sama sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing serta membawa organisasi ke arah pencapai tujuan yang telah di sepakati, oleh sebab itu dalam dalam menjalankan tugas kepala Desa sepatutnya mengutamakan kepentingan rakyat karna Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab suatu organisasi di butuhkan pemimpin yang berintegritas, dan inovatif dalam membangun Desa.

Dalam menjalankan roda kepemimpinan sebagai kepala Desa, penyelenggara pemerintahan Desa dituntut harus menguasai tupoksi sebagai kepala Desa dan memberikan sentuhan inovatif dan progresif sebagai salah satu tipe dalam kepemimpinan kepala Desa. Sedangkan menurut Mustakim (2015:12) tipe kepemimpinan seperti ini di tandai dengan adanya kesadaran baru dalam mengelola kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Model kepemimpinan ini tidaklah anti terhadap perubahan, partisipasi masyarakat dibuka seluas-luasnya, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang seperti ini kepala Desa akan mendapat



legitimasi yang lebih besar dari masyarakat. Aspek yang paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan Desa ialah Legitimasi hal ini terkait dengan keabsahan sebagai pemimpin kepercayaan dan hak berkuasa. Legitimasi juga berkaitan dengan sikap masyarakat kepada kewenangan. Kewenangan dalam memimpin, memerintah dan menjadi representasi dari masyarakatnya, model kepemimpinan ini lebih melibatkan partisipasi masyarakat Desa. Berikut tabel indikator dalam mengukur kepemimpinan yang berkemampuan pemerintah Desa.

Tabel 4.9

## Indikator kepemimpinan yang berkemampuan

Indikator	Desa Tanjung	Desa Teniga	Desa Malaka
Pemimpin yang sadar akan tugas pokok dan fungsi	Desa Tanjung yang dipimpin oleh bapak budiawan SH sejak 2015 mendapatkan respon baik dari masyarakat, hal ini disebabkan oleh kinerja pemerintah Desa yang terus inovatif dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil analisis penulis dalam keseharian kepala Desa di ruang kerja ialah dengan membangun keharmonisan komunikasi kepada staf Desa, serta selalu mengevaluasi capaian kegiatan pemerintah Desa pada anggaran Desa 2017.	Desa pada tahun 2017/2018 di pimpin oleh PLT kepala Desa yaitu bapak H.M. Mudahar. PLT Desa teniga dianggap cukup baik dalam melaksanakan tugas dan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat ukur dari pelaporan pertanggungjawaban Desa yang baik.	Tentu mereka sadar akan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemangku pemerintahan Desa tetapi jauh dari kata maksimal, semisal program-program Desa tidak begitu massif di masyarakat, arah-arahan dari pemerintah Desa bahkan sangat minim dan kesadaran akan tugas dan fungsi Desa tentu seharusnya bisa dirasakan dengan terobosan-terobosan program, yang inovatif di tengah-tengah masyarakat seperti kegiatan pokdarwis , akan tetapi selama ini Desa malaka hal semacam in tidak terdengar kalau pemerintah Desa jadi penggerak.

<p>Mampu mempertanggungjawabkan segala kebijakan baik kepada bawahan dan masyarakat</p>	<p>Kepala Desa Tanjung, secara umum telah mampu mempertanggungjawabkan kebijakan kepada bawahan dan masyarakat Desa, hal ini dilihat dari prinsip transparansi yang diterapkan kepala Desa, dan responsifnya kepala Desa ketika ada masalah atau aduan dari masyarakat Desa.</p>	<p>PLT kepala Desa Teniga cukup baik dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam hal ini PLT kepala Desa hanya menjalankan RKPDesa yang sudah disepakati pada tahun 2017, sehingga secara kebijakan PLT kepala Desa Teniga tidak terlalu terlihat, namun kebijakan bersama yang dilakukan telah berjalan dengan baik, seperti kebijakan menjalankan program Desa yang tertuang dalam RKPDesa 2017 terlaksana dengan optimal dengan pertanggungjawaban yang baik juga.</p>	<p>Perihal pertanggungjawaban kebijakan kepada bawahan dan masyarakat, bisa diukur dari program yang teralisasi, ada beberapa program yang belum bisa direalisasikan dan ada beberapa program belum maksimal pada saat pelaksanaan seperti kegiatan fisik hal ini menurut bapak mohmad Tamrin selaku tokoh pemuda pelopor, melihat kondisi pengelolaan keuangan Desa tahun 2017 yang mengalami keterlambatan dalam pertanggungjawaban juga bisa diukur lemahnya korelasi antara kepala Desa dan staf Desa.</p>
---	--	--	--

Desa Tanjung yang di pimpin oleh bapak Budiawan sejak 2014 sampai 2018 mendapatkan respon baik dari masyarakat Desa Tanjung, hal ini disebabkan oleh kinerja pemerintah Desa yang terus inovatif dalam pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat, dalam temuan lapangan penulis juga menganalisis cara kinerja dan cara komunikasi kepala Desa Tanjung hal itu menunjukkan keharmonisan di ruang kerja dan staf di Desa Tanjung, gaya kepemimpinan dilakukan untuk membangun kinerja secara kolektif sehingga membuat staf Desa nyaman dalam menjalankan tupoksinya masing-masing.

Berhubungan dengan hal diatas , Masyarakat Desa sebagai objek dari kepentingan pemerintah Desa Tanjung dalam melaksanakan kegiatan yang telah melakukan penyampaian secara terbuka oleh pemerintah Desa terhadap masyarakat terkait dengan program yang telah dilaksanakan, dengan kepala Desa yang mempunyai kapabilitas yang baik maka kegiatan yang dilakukan terealisasi dengan baik. Hal ini juga disampaikan oleh bendahara Desa Tanjung ibu I Wayan Ratih.

“sejauh ini gaya kepemimpinan bapak kepala Desa sudah maksimal dan dilakukan dengan baik, setiap anggaran yang masuk dan keluar harus di sampaikan langsung saat rapat dengan BPD sehingga kami disini mengedapankan prinsip transparansi anggaran Dana Desa ”(wawancara tanggal 11 April 2018 pukul 10.00 Wita)

Penyampain diatas bisa kita katakana bahwa gaya kepemimpinan dari Kepala Desa Tanjung cukup baik bila diukur dengan terrealisasinya anggaran Desa dengan baik, namun untuk peningkatan kapasitas kinerja perangkat Desa dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang menggunakan anggaran dana Desa juga sangat diperlukan sehingga kedepan perangkat Desa lebih inovatif lagi dalam menyusun program kerja Desa Tanjung.

Berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam hal ini kepala Desa, di Desa Teniga terjadi pemilihan 2017 dan kepala Desa yang sekarang di lantik tahun 2018 bulan februari, jadi yang bertanggung jawab atas anggaran Desa tahun 2017 adalah PLT yaitu staf dari kecamatan Tanjung, PLT kepala Desa bapak Muhrim S.sos di tahun anggran 2017 cukup baik, yang sebelumnya pada pertanggungjawaban dana Desa selalu telat dan mendapatkan teguran dari pihak kecamatan selaku Pembina. PLT kepala Desa Teniga di anggap cukup baik dalam melaksanakan tugas dan mampu dalam menjalankan kebijakan- kebijakan yang telah disepakati bersama, bapak Muhrim menjadi PLT Desa Teniga selama satu tahun dan digantikan oleh bapak Maswandi yaitu kepala Desa terpilih, namun pada pengelolaan Dana Desa di tahun 2017 juga tidak sepenuhnya bisa direalisasikan ada beberapa program yang tidak bisa direalisasikan,tapi jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya yaitu bapak Kadir Desa Teniga bisa dikatakan tidak baik dikarenakan pertanggungjawaban yang tidak baik dan selalu tidak tepat waktu, senada dengan kepala kecamatan Tanjung yaitu bapak Samsudin S.PD M.PD saat di wawancarai mengatakan,

“Desa Teniga saat ini secara pelaporan keuangan Desa cukup baik, ada kemajuan, yang sebelumnya biasa desa terkahir yang melporkan pertanggungjawaban dan mendapat nilai buruk karna banyak kesalahan dalam pelaporan keuangan, namun pergantian kepemimpinan lalu di tunjuk PLT bapak Muhrim ada kemajuan, dan ini yang kita harapkan dari kepala Desa selanjutnya yaitu kepala Desa bisa menguasai tupoksi dalam memimpin” (wawancara pada tanggal 14 april 2018 pukul 10:00 Wita)

Paparan diatas dapat kita cermati bahwa Desa Teniga dalam pengelolaan Dana Desa di tahun 2017 cukup baik dari tahun sebelumnya saat di pimpin oleh kepala Desa sebelumnya, hal ini bisa dilihat dari pemaparan dan wawancara diatas,

dalam mengelola pemerintahan Desa memang di butuhkan pemimpin yang punya kapasitas agar bisa mempetanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat.

Desa Malaka juga masih dikatagorikan jauh dari kesempurnaan, hasil analisis dilapangan operator Desa Malaka masih dalam pelatihan-pelatihan tentang system keuangan Desa, karna pada pertanggungjawaban anggaran tahun 2017 terjadi kesalahan pengimputan data keungan untuk membuat Surat Pertangung Jawaban (SPJ). Berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam hal ini adalah Kepala Desa, kepala Desa Malaka yaitu bapak H.Akmaludin Ichwan di tahun 2017 mengelola pelaksanaan anggaran dengan jumlah 2.653.173.000,00, anggaran sebesar ini dibagi dalam tiga belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, berikut rincian belanja Desa

Tabel 4.10

Belanja Desa Malaka Tahun 2017

<b>Belanja Desa</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	578.700.000,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	912.233.000,00
<b>Belanja Modal</b>	968.237.670,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.459.170.670,00</b>

Dari tabel diatas dapat kita cermati belanja Modal tertinggi dilakukan oleh pemerintah Desa Malaka yang dikuti oleh belanja barang dan jasa serta belanja pegawai, disini bisa kita lihat bagaimana seorang pemimpin yaitu kepala Desa mengelola anggran dengan baik, tranfaran dan akuntabel. Salah satu pemerhati Desa Malaka yaitu bapak Muhamad Tamrin menilai pemerintahan Desa Malaka

seharusnya memfokuskan program kerja pada sektor pariwisata, karna potensi Desa Malaka ada di parawisata sehingga program kerja Desa Malaka harus menjunjang sektor pariwisata sehingga bisa mendongkrak pendapatan Daerah dan Desa. Senada dengan pernyataan pak tamrin berikut hasil wawancara dengan bapak Armin selaku anggota BPD Desa Malaka.

“gaya kepemimpinan kepala Desa sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya, jika kepala Desa kaku seperti ini maka dampak yang muncul terhadap kinerja pegawai yang tidak maksimal, dalam memimpin Desa Malaka bapak kades masih dengan gaya lama dengan memfokus anggran pada belanja fisik, padahal potensi yang ada di Desa Malaka dengan Sumber Daya Alam yang sangat luarbiasa belum bisa di manfaatkan dengan maksimal, seandainya program Desa fokus terhadap pembangunan sektor pariwisata maka akan menumbuhkan prekonomian masyarakat sekitar dan mengurangi pengangguran di Desa Malak” (wawancara tanggal 17 mei 2018 pukul 13.00 Wita).

Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk mengukur kepemimpinan yang berkampuan dapat diukur dalam mengelola anggran dan target capaian sebagai pemimpin tentu untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepemimpinan kepala Desa Malaka masih kurang dalam mengembangkan potensi Desa dari sektor pariwisata, padahal potensi pariwisata sangat menjajikan perekonomian yang baik untuk masyarakat Desa malaka.

Dari pengamatan di lapangan bisa kita pahami kepemimpinan di tiga Desa ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan dana Desa, tapi pemerintah daerah dalam hal BPMD selaku Pembina masih memberikan toleransi serta mencoba memahami dengan kondisi Desa di tahun 2017 serta kemudian menjadi bahan evaluasi untuk membangun dan di perketat pada tahun 2018

Berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kepala Desa dalam menjalankan dan Desa di tahun 2017 berikut hasil wawancara dengan bapak H.Holidi Halil kepala BPMD Kabupaten Lombok Utara

“mengukur kemampuan manusia agar bisa maksimal 100% sukses dalam menjalankan amanah mungkin tidak, karna melihat kondisi staf Desa yang tidak merata kemampuannya, namun jika pemerintahan Desa dikatakan dalam pelaksanaan tugas serta wewenangnya mencapai tahapan 80% itu masih memungkinkan, hal ini kita lihat dari rincian realisasi kegiatan dan kondisi lapangan terkait dengan pembangunan Desa serta bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan yang dibuat sama mereka”

Dari hasil wawancara diatas dapat di cermati bahwa sebenarnya dari pihak pemerintahan daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) khusus pada pemerintahan Desa juga memahami dan memberikan toleransi terkait dengan pelaksanaan Dana Desa pada tahun 2017, karna di Desa masih perlu pelatihan-pelatihan atau Bimtek kepada staf serta kepala Desa Langung agar dalam mengelola anggran Desa menjadi maksimal.

Disisi lain program yang dilakukan oleh BPMD Kabupaten Lombok Utara pasca pergantian Kepala Dinas yang dulunya Bapak Herianto dan sekrang di gantikan oleh Bapak H. Holidi yang fokus pada pembinaan atau peningkatan sekil perangkat Desa dan Kepala Desa yang dimana membuat program pelatihan dan Bimtek pada perangkat Desa, agar pada pertanggungjawaban keuangan Desa selanjutnya akan lebih baik dan maksimal.

#### **V.6. Dapat diterima Oleh Semuah Pihak**

Salah satu faktor yang mendukung akuntabilitas adalah bilamana pertanggungjawaban pemerintah dapat diterima oleh semua pihak dan selanjutnya yang menjadi standar dari aturan dibuat oleh hasil dari kesepakatan antara



masyarakat maupun instansi pemerintah dalam mengukur suatu keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran. Hal ini tentu dibutuhkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan keuangan Desa.

Prinsip transparansi dan keterbukaan informasi tentang pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah dan aparat akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu dengan adanya keterbukaan informasi maka tidak akan ada kecurigaan dari masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran Desa. Agar dapat diterima oleh semua pihak penulis membuat indikator pengukuran seperti tabel berikut.

Tabel 4.11

Indikator agar diterima oleh semua pihak

Indikator	Desa Tanjung	Desa Teniga	Desa Malaka
Pemerintah Desa mengkomunikasikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa ke semua pihak	Pemerintah Desa Tanjung mengkomunikasikan pertanggungjawaban keuangan Desa di beberapa sektor saja, seperti masyarakat Desa dengan memampang baleho di depan kantor Desa, dan juga pihak pemerintah Desa mengkomunikasikan pertanggungjawaban ke pihak kecamatan Tanjung sebagai Pembina serta ke BPMDes Kabupaten Lombok Utara. Desa Tanjung juga mengkomunikasikan pertanggungjawaban ke keuangan Desa ke inspektorat.	Sama halnya dengan Desa Tanjung, Desa Teniga selalu mengkomunikasikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa ke BPD Teniga, menginformasikan ke masyarakat dengan memampang baleho yang berisi keuangan Desa Teniga serta mengkomunikasikan ke kecamatan tanjung dan BPMD Kabupaten Lombok Utara, pihak Desa juga selalu mengkomunikasikan dengan inspektorat dalam menyusun pembuatan pertanggungjawaban.	Keuangan Desa Malaka dalam pertanggungjawabannya selalu mengkomunikasikan ke semua pihak, seperti BPD, Kecamatan Pemenang, dan BPMD. Desa Malaka juga dibantu oleh inspektorat dalam pembuatan pelaporan keuangan Desa sebelum di audit oleh BPK.



Desa Tanjung seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya pada pengelolaan anggaran tahun 2017, masyarakat Desa Tanjung cukup aktif dalam kegiatan Desa, seperti kegiatan musrembang dusun, masyarakat Desa sangat antusias menyampekan aspirasi secara pribadi dan kelompok agar bisa masuk dalam anggaran 2017, dalam perencanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa Tanjung melibatkan semua stakeholder yang ada di Desa Tanjung seperti organisasi kepemudaan, kelompok usaha, dan para tokoh masyarakat, hal ini dilakukan agar kepentingan masyarakat bisa terpenuhi.

Pemerintah Desa Tanjung pada saat melakukan musrembang dusun berkoordinasi dengan BPD sebagai perwujudan tangan dari masyarakat, dengan demikian aspirasi masyarakat bisa terkaper, dalam penyusunan RPJMDesa yang menjadi acuan lima tahunan program Desa melalui RKP Desa, hal ini dilakukan oleh pemerintah Desa dengan melihat kebutuhan yang paling mendasar masyarakat Desa Tanjung, sehingga fokus penggunaan dana Desa di tahun 2017 lebih banyak pada pembangunan Desa.

Berkaitan dengan hal diatas bapak Ibnu sandi selaku Anggota BPD menjelaskan :

“ditahun anggaran 2017, sejauh ini pemerintahan Desa Tanjung melibatkan semua stakeholder yang ada di Desa Tanjung pada proses perencanaan program kerja serta capaian RPJMDesa, ini dilihat kegiatan yang dilakukan seperti musrembang Dusun sampai musrembang Desa selalu melibatkan semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai rasa percaya pada pemerintahan Desa saat ini dan mendapatkan pengakuan”

Dari hasil wawancara diatas dapat memberikan penjelasan bahwa pemerintah Desa dalam hal ini dalam perencanaan kegiatan melibatkan stakeholder yang ada di Desa Tanjung, dengan adanya keterbukaan pemerintah Desa terkait

dengan perencanaan serta kegiatan program yang akan dijalankan oleh pemerintah Desa maka masyarakat menerima setiap usulan yang dilakukan oleh Desa.

Dari penjelasan diatas menurut penulis pelaksanaan dan Desa di Desa Tanjung pada tahun 2017 berjalan cukup maksimal, hal ini bisa dilihat dari kegiatan program yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Tanjung yang di terima oleh masyarakat. Namun pada saat pelaksanaan program fisik pemerintah Desa Tanjung memberikan ke pihak ketiga yaitu dikerjakan oleh para pekerja bangunan yang sudah dibayar oleh pemerintah Desa, hal ini membuktikan pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Tanjung masih minim.

Sementara Desa Teniga dalam perencanaan pembangunan di Desa Teniga tidak adanya rapat terbuka dengan masyarakat, perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa, BPD dengan tim pelaksana kegiatan (TPK), yang selanjutnya dalam pengambilan keputusan untuk pembuatan rabat jalan di setiap dusun menjadi prioritas Kepala Desa yang saat itu masih menjabat mantan Kepala Desa bapak kadir pada saat perencanaan namun pada saat pelaksanaan kegiatan di eksekusi oleh PLT kepala Desa Teniga.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut maka keterlibatan masyarakat merupakan salah satu cara strategi yang harus di ambil oleh pemerintah untuk berbagai macam pembangunan Desa, yang terjadi di Desa Malaka masih adanya keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan Desa, salah satu contoh pembuatan rabat jalan di dusun-dusun Desa Teniga pada tahun 2017, namun keterlibatan masyarakat hanya sebagai pekerja yang nantinya dibayar oleh pihak ketiga, adapun partisipasi masyarakat dalam membantu kegiatan Desa yaitu pada hari minggu disaat masyarakat libur bekerja.

Berkaitan dengan hal diatas berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Agus Rahman selaku anggota BPD Tahun 2017 memberi penjelasan sebagai berikut :

“pada dasarnya masyarakat menerima pelaksanaan dan Desa Tahun 2017 di Desa Teniga ini terkait dengan pembangunan Desa, ada beberapa masyarakat Desa yang terlibat langsung dalam pembangunan Desa yang menjadi pekerja dalam proyek rabat jalan, dan biasanya masyarakat Desa ikut membantu pekerjaan di hari minggu, seperti gotong royong”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat dapat merespon terkait dengan pemberian dana Desa oleh pemerintah pusat dan juga pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Teniga, memang pada tahapan pelaksanaan program masih belum berjalan secara efektif dan selain keterbatasan SDM yang dialami oleh pemerintah Desa Teniga. Keterlibatan pihak ketiga pada pembangunan Desa Teniga khususnya pembangunan fisik belum berjalan secara maksimal, harapan dari masyarakatpun agar kedepan tidak perlu lagi melibatkan pihak ketiga, karna masyarakat Desa merasa bisa membuat rabat jalan tanpa melibatkan pihak ketiga lagi.

Melihat fenomena terjadi di Desa Teniga pada tahun 2017 yang telah penulis sampekan sebulmnya terkait juga dengan wawancara dengan salah satu anggota BPD, bahwa di Desa teniga terjadi gesekan antara pemetrintah Desa dan masyarakat Desa terkait dengan penggunaan anggaran Desa. Karna tidak adanya keterbukaan mengenai anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa, seperti pembuatan rabat jaalan yang seharusnya menurut salah satu warga bapak Ridhowan harus ada papan transfaransi anggaran disetiap pelaksanaan proyek, sehingga masyarakat percaya

besaran anggaran yang di pakai secara rinci juga, agar program Desa bisa diterima oleh semua pihak.

Sedangkan Desa Malaka memiliki hampir kesaamaan dengan Desa Teniga karna pada saat perencanaan pembangunan Desa tidak ada rapat terbuka dengan masyarakat, sehingga perencanaan dilakukan oleh pemerintah Desa, Tim pelaksana Kegiatan dan BPD yang selanjutnya dalam pengambilan keputusan Kepala Desa sangat berpengaruh, pada saat penentuan pembangunan Desa, kepala Desa memprioritaskan pembangunan Desa pada pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Desa.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut maka keterlibatan masyarakat merupakan salah satu langkah starategi yang harus diambiloleh pemerintahan Desa Malaka, agar masyarakat bisa mengontrol langsung pembangunan Desa, namun yang terjadi di Desa Malaka tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa, salah satu contoh pembangunan infrastruktur Desa tidak ada keterlibatan masyarakat Desa dan yang mengerjakan kegiatan tersebut diberikan kepada pihak ketiga yaitu kontraktor. Kenapa hal ini bisa terjadi menurut pernyataan tokoh masyarakat Desa Malaka bapak Rizal saat di wawancara oleh penulis.

”rata-rata kehidupan masyarakat Desa Malaka tergolong mampu dengan pendapatan yang baik di sector pariwisata, maka dari itu pemuda sering menolak ketika diajak bekerja kasar/menjadi buruh tukang, karna rata-rata pemuda Desa Malaka kerja di perhotelan,namun terkait dengan proyek infrastruktur Desa, kepala Desa Malaka cenderung memberikan kepada pihak ketiga yang di anggap profisoinal dalam bekerja.(wawancara tanggal 21 april 2018 pukul 14:00 Wita)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat merespon pembangunan yang terjadi di Desa, namun untuk ikut terlibat langsung pada saat pelaksanaan sejauh ini dari hasil analisis masyarakat sulit digerakkan khusus untuk pemuda, hal ini disebabkan oleh kesibukan masyarakat yang berkerja di sektor pariwisata seperti berkerja di perhotelan, menjadi pendamping turis sehingga waktu mereka dalam mengikuti pembangunan Desa seperti apatis, tapi secara kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa masyarakat sejauh ini menerima dan berharap agar kinerja yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan agar berkerja secara maksimal, secara tidak langsung mayoritas masyarakat Desa Malaka percaya sepenuhnya pada Pemerintah Desa dalam membuat kebijakan.

#### **V.7. Perlu Pemahaman Masyarakat**

Yang dimaksudkan perlunya pemahaman masyarakat adalah penyampaian secara terbuka kepada masyarakat terkait dengan kegiatan yang nantinya dikerjakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa, dan apa dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut serta bagaimana tanggapan masyarakat terkait program yang dibuat oleh Pemerintah Desa, oleh sebab itu kepala Desa sebagai pemegang otoritas tertinggi di Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kegiatan sangat perlu untuk mempertinggikan secara matang terkait dengan hal yang akan diprioritaskan di Desa disamping itu juga kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintah haruslah mampu dalam memberikan penjelasan atau merasionalisasikan kepada masyarakat dengan perencanaan kegiatan tersebut.

Dalam merencanakan program dengan Pemerintah Desa masyarakat harus menimbang dampak positif dan negatif yang akan terjadi saat perencanaan kegiatan dikerjakan oleh Pemerintah. Disamping itu Pemerintah juga harus membuka ruang



bagi masyarakat untuk memahami dan menanggapi setiap jenis kegiatan yang dikerjakan oleh Pemerintah terkait dengan tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut. Oleh sebab itu masyarakat menerima ataupun tidak menerima suatu kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah tergantung sejauh mana pemerintah mampu memberikan pemahaman terkait dengan kegiatan tersebut yang di rancang kepada masyarakat. Oleh sebab itu dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperluka dalam peroses perencanaan, sebab pada dasarnya tidak ada seatu kebijakan yang diambil tanpa persetujuan dari rakyat. Oleh sebab itu penulis membuat tabel indikator dalam pengukur pemahaman masyarakat Desa.

Tabel 4.12

## Indikator perlunya pemahaman masyarakat Desa

Indikator	Desa Tanjung	Desa Teniga	Desa Malaka
<p>Penyampean terbuka kepada masyarakat atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa</p>	<p>Pemerintah Desa Tanjung selalu melakukan komunikasi kepada masyarakat saat melakukan kegiatan, seperti kegiatan pembangunan Desa pada bidang fisik, sebelum di eksekusi akan ada pemberitahuan langsung dari pemerintah Desa Tanjung, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan tidak hambatan atau protes saat pengerjaan dari masyarakat Desa. Seperti pembangunan Drenase oleh pihak pemerintah Desa di Dusun Gubuk Baru.</p>	<p>Desa Teniga pada pengelolaan keuangan Desa tahun 2017 memprioritaskan pembangunan Desa di sektor fisik seperti pemanfaatan dan pemeliharaan talud, drenase dan saluran pembuangan dengan jumlah anggaran 445,823.254, kegiatan ini sebelum dieksekusi pemerintah Desa menginformasikan ke pada masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap kegiatan ini, namun masyarakat tidak selalu diberitahu kegiatan ini dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor)</p>	<p>Pemerintah Desa Malaka pada anggaran 2017 penggunaan anggaran diprioritaskan pada pembangunan Desa pada sektor fisik, yang dimana serapan anggaran terbesar pada pembuatan jalan yang menelan anggaran 731.835.500, meskipun kegiatan diserahkan pada pihak ketiga namun masyarakat Desa tidak ada yang komplain. Tapi secara penyampean informasi kegiatan pada masyarakat Desa, pemerintah Desa Malaka terkesan dadakan.</p>



Seperti yang telah dibahas sebelumnya Desa Tanjung menjadi Desa Percontohan, dalam merancang RPJMDesa Pemerintah Desa Tanjung melibatkan seluruh elemen masyarakat saat musrembang Desa sehingga yang tertuang dalam RPJMDesa Tanjung adalah kebutuhan dari masyarakat Desa Tanjung, hal ini tidak terlepas dari peran Kepala Desa yang cukup aktif dan merespon langsung apa yang menjadi aduan masyarakat, seperti dalam penanganan sampah yang terjadi di Desa Tanjung, atas ada aduan warga yang merasa tidak ada pengelolaan sampah yang baik di Desa, sehingga Kepala Desa di tahun selanjutnya menganggarkan pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu yang besar anggaran sejumlah 35.000.000 yang dibelikan barang untuk diberikan kepada masyarakat, respon yang dilakukan seperti ini oleh Pemerintah Desa membuat masyarakat antusias dalam merencanakan program selanjutnya, sehingga Pemerintah Desa memberikan pemahaman langsung terhadap masyarakat karena pentingnya partisipasi masyarakat agar program yang di biyai dari Dana Desa itu tepat sasaran serta apa yang menjadi keinginan masyarakat menjadi prioritas pemerintah Desa.

Sejauh ini di Desa Tanjung tidak adanya komplain terkait dengan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa memahami betul apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa terkait pembangunan Desa, seperti pembangunan drainase di Dusun Gubuk Baru yang dulunya sering dimasuki air saat hujan akibat dari serapan tanah yang lambat, sehingga Pemerintah Desa memanfaatkan Dana Desa ini untuk mengatasi masalah yang ada di Desa Tanjung khususnya di tahun anggaran 2017.

Sejalan dengan hal yang dipaparkan diatas berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD Desa Tanjung yaitu bapak Armin.

Menurut saya kegiatan pembangunan di Desa Tanjung seiring dengan aspirasi masyarakat dan masyarakat dapat memahami dampak positif dari penggunaan dana Desa, salah satunya seperti pembangunan drenase di dusun gubuk Baru, hal ini dapat kita lihat manfaat dari pembangunan drenase, masyarakat akhirnya terhindar dari ancaman banjir pada saat musim hujan dan hal ini sangat di rasakan riil oleh masyarakat Desa.(wawancara tanggal 25 april 2018 pukul 11:00 wita)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat yang partisipasi terhadap pembangunan Desa dan ikut dalam tahap perencanaan membuat program itu akan tepat sasaran, serta masyarakat dapat memahami secara positif terkait kebijakan Pemerintah Desa dengan memanfaatkan Dana Desa pada tahun 2017 di Desa Tanjung dalam pembangunan Desa khususnya pada kegiatan pembuatan drainase, walaupun pembangunan drainase hanya di Dusun Gubuk Baru dan masyarakat keseluruhan tidak merasakan dampak dari pembangunan drainase, namun pada dasarnya masyarakat memahami bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Tanjung.

Desa Teniga pada tahun 2017 dalam penggunaan Dana Desa lebih banyak diprioritaskan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan talud, drainase dan saluran pembuangan dengan jumlah anggaran 445.823.254, pembangunan ini dilakukan oleh pihak ketiga namun pada realisasinya masyarakat juga ikut membantu/gotong royong pada saat hari libur.

Pembangunan talud, drainase dan saluran pembuangan sangatlah penting bagi masyarakat Desa Teniga dan sejauh ini tidak ada komplain dari penggunaan Dana Desa, hal ini dikarenakan masyarakat memahami betul terkait pembangunan talud, drainase dan saluran pembuangan sangat mereka butuhkan melihat kondisi Desa yang rawan longsor karna letak geografis Desa di daerah pegunungan.

Senada dengan yang dipaparkan diatas, berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu anggota masyarakat bapak H. Halid

“Menurut saya kegiatan pembangunan di Desa Teniga masyarakat dapat memahami terkait dengan dampak positif dari penggunaan dana Desa, seperti pembangunan talud, drainase, dan saluran pembuangan karna dengan adanya kegiatan ini masyarakat sangat terbantu dari kondisi sebelumnya dan pembangunan ini sangat rill dirasakn oleh masyarakat Desa Teniga khususnya dusun Dasan Tengah yang rawan longsor saat musim penghujan.(wawancara tanggal 22 april 2018 pukul 11:00 wita)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita cermati bahwa masyarakat dapat memahami dampak positif terkait dengan kebijakan Pemerintahan Desa dengan memanfaatkan Dana Desa pada tahun 2017 di desa Teniga untuk pembangunan Desa khususnya pada kegiatan pembangunan talud, drainase dan saluran pembuangan, memang masyarakat tidak secara keseluruhan berdampak pada pembangunan ini, namun pada dasarnya masyarakat dapat memahami masalah dan bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Teniga.

Samahalnya dengan Desa Teniga, Desa Malaka pada anggaran 2017 penggunaan dana Desa diprioritaskan pada sektor pembangunan fisik yang dimana anggaran terbesar pada bidanng pembangunan Desa yaitu pada kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan yang menelan anggaran sejumlah 731.835.500, meskipun kegiatan ini diserahkan ke pihak ketiga namun pada tahapan realisasinya masyarakat dapat memahami terkait dengan manfaat pembangunan jalan tersebut, karena pada sebelumnya di rabat jalan di dusun-dusun sangatlah rusak.

Melihat kondisi jalan yang memang tidak layak, kemudian melatar belakangi pemerintah Desa malaka mengambil kebijakan dengan dana Desa di tahun 2017

untuk membuat dan pemeliharaan jalan, sehingga jalan di Desa Malaka menjadi layak bagi pemotor dan pejalan kaki yang sejauh ini dikeluhkan oleh masyarakat Desa.

Berkaitan dengan hal diatas berikut hasil wawancara dengan bapak Sukri selaku anggota BPD Desa Malaka

“Pembangunan jalan ini saya pikir sangat mendapat respon positif oleh masyarakat, hal ini dapat kita lihat dari manfaat pembangunan jalan, jalan yang bagus adalah harapan semua warga karna ada kemudahan akses, yang sebelumnya jalan yang rusak sangat rawan warga kecelakaan.(wawancara tanggal 16 april 2018 pukul 10:00 wita)

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Malaka dengan membangun jalan sangatlah mendapatkan respon positif dari masyarakat, meskipun dalam perencanaan kebijakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang otoritas tertinggi, namun pada saat realisasi kegiatan masyarakat dapat memahami dampak positif dari pembangunan jalan. Namun beberapa warga Desa Malaka menuntut agar penggunaan dan Desa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk mengelola Desa seharusnya ada komunikasi secara terbuka oleh Pemerintah Desa agar tidak menimbulkan pemikiran yang subjektif dari kalangan masyarakat kepada Pemerintah yang nantinya akan berdampak pada hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

## **V.8.Adaptasi Secara Terus Menerus**

Hal yang menyebabkan suatu perubahan pada masyarakat, diakibatkan adanya faktor pendorong, sehingga menimbulkan perubahan. Oleh sebab itu kepala Desa sebagai pelaksana pertanggungjawaban Dana Desa seharusnya memiliki reaksi dengan melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa. Dan tentunya tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa namun seluruh elemen dan stakeholder yang terhimpun dalam struktur Pemerintahan Desa yang harus berperan aktif dengan melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat, baik perubahan secara perilaku maupun tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka kebijakan yang harus diambil harus benar-benar menyentuh terhadap masyarakat bawah, Pemerintah Desa harus menjadikan masyarakat sebagai objek yang merasakan langsung dari kebijakan yang dibuat. Hal ini akan menjadi indikator bagi Pemerintah Desa untuk melakukan evaluasi secara terus menerus terkait dengan pelaksanaan Dana Desa serta melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa. Adapun indikator pengukuran pemerintah Desa dalam adaptasi secara terus menerus sebagai berikut.





Tabel 4.13

## Indikator adaptasi secara terus menerus

Indikator	Desa Tanjung	Desa Teniga	Desa Malaka
Peningkatan akuntabilitas pemerintahan Desa	Penggunaan dana Desa secara bertahap di Desa Tanjung pada anggaran 2017 yang kemudian pemerintahan Desa dalam RKP Desa difokuskan pada pembangunan Desa, pertanggungjawaban keuangan Desa Tanjung tahun anggaran 2017 bisa dikatakan baik, dilihat dari ketepatan waktu dan menjadi no satu di kecamatan tanjung dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa menurut pernyataan dari kepala camat Tanjung.	Peningkatan akuntabilitas pada pemerintahan Desa Teniga sejauh ini berjalan dengan baik, dibandingkan dengan pertanggungjawaban keuangan Desa pada tahun 2016 yang mengalami keterlambatan dan teguran dari pihak kecamatan Tanjung, namun pada pertanggungjawaban keuangan Desa pada tahun 2017 pemerintah Desa mendapatkan peringkat ke tiga ini menjadi peningkatan terhadap akuntabilitas keuangan Desa Teniga.	Kondisi berbeda dengan Desa Tanjung dan Desa Teniga, pemerintah Desa Malaka pada pengelolaan anggaran tahun 2017 melakukan keterlambatan dalam pertanggungjawaban keuangan Desa, hal ini menyebabkan tidak ada peningkatan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan Desa Malaka.
Mengikuti perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa	Penomena yang terjadi pada masyarakat Desa harus diperhatikan, apakah masyarakat sudah puas dengan kinerja dari pemerintah Desa, maka disini pemerintah Desa	Desa teniga yang merupakan Desa terletak di pegunungan, pemerintah harus mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat Desa, seperti dari segi prekonomian, salah satu	Potensi yang terjadi di Desa Malaka ialah perkembangan di sektor pariwisata, hal ini membuat prekonomian masyarakat Desa Malaka meningkat tiap tahunnya,

	<p>Tanjung harus melihat kondisi masyarakat, seperti di Desa Tanjung masyarakat yang cukup partisipatif terhadap pembangunan Desa membuat pemerintah Desa harus lebih responsive terhadap perkembangan atau keinginan masyarakat Desa Tanjung, perubahan secara ekonomi, seperti perkembangan UMKM di Dusun-dusun yang ada di Desa Tanjung, penyediaannya BumdesMart oleh Desa Tanjung yang bisa menghimpun produk lokal dan dipasarkan oleh BUMDesa Desa Tanjung. Maka dari itu pemerintah Desa Tanjung mempersiapkan program-program pemberdayaan masyarakat dari sektor ekonomi.</p>	<p>Dusun di Desa Teniga yaitu Dusun Batu lilir memiliki potensi ekonomi yang bergerak diternak madu, hamper sebagian masyarakat di Dusun itu menjadi ternak madu namun masih belum disentuh oleh pemerintah Desa dengan tidak adanya program perbantuan di bidang pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>namun pemerintah Desa Malaka secara sadar memahami perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat namun pemerintah Desa tidak terlalu membuat program yang menjadi potensi Desa dan ini menjadi kritikan yang sering dilakukan oleh LSM yang bergerak dibidang kemajuan pariwisata Desa Malaka.</p>
--	---	--	---



Penggunaan Dana Desa secara bertahap di Desa Tanjung pada tahun anggaran 2017 yang kemudian Pemerintah Desa dalam RKP Desa difokuskan pada terhadap pembangunan Desa, dalam sebuah kebijakan tentu tidak akan memuaskan semua pihak itupun yang terjadi di masyarakat Desa Tanjung yang beberapa orang mengatakan belum bisa dikatakan maksimal, terkait dengan itu ibu I Wayan Ratih selaku bendahara Desa Tanjung memberikan penjelasan bahwa

“terkait dengan hasil pengelolaan dana Desa di Desa Tanjung ini memang pada tahapan pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, ini disebabkan ada aplikasi SISKUDES yang sangat membantu dalam pembuatan SPJ dan pertanggungjawaban secara terintegrasi dengan baik oleh pemerintah Desa, memang pada pembangunan Desa yang merasakan dampak dari penggunaan Dana Desa ini adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari pemebangunan itu sendiri, namun pemerintah Desa akan tetap terus berusaha agar masyarakat Desa Tanjung menikmati secara keseluruhan dari pelaksanaan dana Desa setiap tahunnya”(wawancara tanggal 22 april 2018 pukul 09:00 wita)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita cermati bahwa pelaksanaan dana Desa pada tahun 2017 di Desa Tanjung memang berjalan dengan baik, karena masyarakat merasakan perubahan terkait dengan adanya pemberian Dana Desa. Pemerintah Desa Tanjung masih terus berupaya agar hasil dari pemberian dana Desa oleh Pemerintah Pusat dapat dirasakan oleh semua pihak dan berupaya mendirikan keadilan social bagi seluruh masyarakat Desa.

Pelaksanaan Dana Desa di tahun 2017 telah bertanggungjawab pada pemerintah tingkat Kecamatan dan Daerah dalam bentuk arsip, namun sejauh ini kehadiran dana Desa diharapkan agar bisa membuat masyarakat ikut aktif dan partisipasi dalam membangun Desa, dan hal ini terlaksana dengan baik di Desa Tanjung yang masyarakat Desa yang cukup partisipatif.

Dana Desa digunakan secara bertahap di Desa Teniga pada tahun 2017 yang kemudian difokuskan terhadap pembangunan Desa ini memang belum bisa dikatakan maksimal, hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat di Desa Teniga merasakan hasil dari pelaksanaan dan Desa di tahun 2017, terkait dengan hal itu bapak Rusmin Nuriadin selaku ketua BPD di Desa Teniga memberikan penjelasan bahwa.

“terkait dengan hasil pengelolaan dana Desa di Desa Teniga tahun pada tahun 2017 ini memang pada tahapan pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik di bandingkan dengan tahun sebelumnya, namun dalam konteks perubahan yang terjadi di masyarakat belum berjalan secara keseluruhan, sebab yang merasakan perubahan dari dana Desa hanyalah masyarakat yang merasakan dampak dari pembangunan itu sendiri, namun pemerintah Desa dan BPD terus berupaya agar dana Desa selanjutnya dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat Desa”(wawancara tanggal 17 april 2018 pukul 10:00 wita)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita cermati bahwa dalam pelaksanaan dana Desa pada tahun 2017 di Desa Teniga memang belum berjalan dengan maksimal tapi lebih baik dari sebelumnya, namun sebagian masyarakat telah merasakan perubahan terkait dengan adanya pemberian dana Desa. Pemerintahan Desa Teniga terus berupaya agar hasil dari pemberian Dana Desa oleh Pemerintah Pusat dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat Desa.

Desa Malaka juga dalam pelaksanaan Dana Desa di tahun 2017 belum bisa dikategorikan telah berjalan secara optimal, sehingga pada pelaksanaan kegiatan masyarakat sedikit yang merasakan perubahan, dan kemudian yang terjadi di Desa Malaka terkait dengan hasil dari kegiatan pelaksanaan yang bersumber dari Dana Desa.

Berkaitan dengan hal diatas berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota BPD Desa Malaka bapak Muhamman Insane Ansori.

“dengan hadirnya dana Desa yang di berikan oleh pemerinatah pusat kepada pemerintah Desa memang sangat membantu dalam pembangunan Desa, maka pemerintah Desa dan masyarakat harus bersyukur serta bersinergi bersama dalam membangun Desa Malaka, memang sejauh ini belum dikatakan optimal kinerja dari pemerintah Desa Malaka tapi sedikit tidak tiap tahun ada perubahan yang baik pada Desa Malaka.”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita cermati bahwa meskipun dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Malaka terbilang belum optimal, namun ada perubahan-perubahan tiap tahunnya dari wajah Desa Malaka, sementara pihak Pemerintah terus berupaya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dengan menjadikan pelaksanaan Dana Desa pada tahap sebelumnya sebagai langkah untuk memperbaiki di tahap pelaksanaan selanjutnya.

Dana Desa pada tahun 2017 di ketiga Desa Ini menurut penulis ada yang berjalan dengan baik namun ada juga yang belum maksimal dalam pengelolaan Dana Desa, hal ini dikarenakan peran kepala Desa dalam mengelola SDMnya belum maksimal, secara pertanggungjawaban administrasi Desa sudah terbantu dengan adanya aplikasi sistem kuangan Desa yang sangat membantu pemerintah dalam pembuatan SPJ, namun ada juga Desa yang sepenuhnya belum memahami aplikasi ini, hadirnya Dana Desa ini diharapkan membuat perubahan yang signifikan terhadap pembangunan Desa, Desa Tanjung menurut laporan dari kecamatan menajdi Desa percontohan dalam menerapkan akuntabilitas Dana Desa, namun berbeda dengan kedua Desa yakni Desa Teniga dan Desa Malaka yang masih belum

optimal sehingga belum bisa dikatakan baik dalam pelaksanaan akuntabilitas Dana Desa.

Meskipun demikian tidak dapat kita pungkiri bahwa upaya Pemerintah Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta pembuatan perubahan yang baik dikalangan masyarakat tidak lah mudah, karna perlu kerja sama dan dukungan dari semua pihak, terutama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa harus ada sinkronisasi program dan menyediakan sarana pelatihan terhadap perangkat Desa sehingga apa yang menjadi kendala Desa bisa ditanggulangi kedepannya, selain itu partisipasi dari masyarakat sangatlah penting untuk mendorong terselenggaranya kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

#### **V.9. Konfirmasi Teoritis Terhadap Temuan-Temuan Akuntabilitas**

Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil temuan-temuan dalam menganalisis indikator teori yang telah di fokuskan pada akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, kepemimpinan yang berkemampuan, diterima oleh semua pihak, pemahaman masyarakat dan adaptasi secara terus menerus, adapun temuan-temuan akuntabilitas pada Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka sebagai berikut.





### **a. Akuntabilitas Program**

Secara umum dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka, perencanaan program pembangunan Desa dan yang menjadi temuan-temuan penulis dilapangan ialah Pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka sejauh ini melakukan musrembang tingkat dusun dan Desa sejalan dengan harapan UU Desa No 6 tahun 2014 namun khusus Desa Teniga dan Desa Malaka hanya menyerap aspirasi masyarakat di bidang fisik saja dan sebenarnya program fisik juga sudah di tentukan oleh pemerintah Desa seperti rabat jalan, pembuatan gorong-gorong dan talud, dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat di Desa Teniga sangat minim, alasan dari salah satu tokoh pemuda yaitu bapak martono yang mengatakan kurangnya masyarakat dilibatkan dalam permasalahan Desa. Pemerintah Desa Malaka pun masih kurang dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat, rata-rata program Desa difokuskan pada pembangunan fisik. Sedangkan Desa Tanjung sejauh ini dalam menjalankan musrembang cukup baik, dimana rata-rata aspirasi masyarakat di himpun yang terpenting sejalan dengan RPJMDesa saat pelaksanaan program terlaksana dengan baik di bandngkan dengan Desa Teniga dan Desa Malaka yang masih ada beberapa program yang tidak bisa di eksekusi pada anggaran tahun 2017

### **b. Akuntabilitas Kebijakan**

Dalam pemilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja

Negara (APBN) tahun 2017 yang untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat Desa telah berjalan sekala dengan sekala prioritas penggunaan dana Desa, namun pada saat pelaksanaan anggaran lebih banyak pada pembangunan fisik, misalnya Desa Tanjung , dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar 1.064.260.000 kemudian digunkana untuk pembangunan Desa Sejumlah 533.741.300, sementara Desa Teniga , dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk Desa sebesar 2.241.538.000, dari besaran anggaran ini kemudian di gunakan untuk pembangunan Desa sejumlah 1.158.509.631 dan Desa Malaka , dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Daerah untuk Desa sejumlah 2.653.173.000 dari besaran anggaran ini kemudian digunakan untuk pembangunan Desa dengan jumlah anggaran 810.801.400 Di anggaran tahun 2017.

#### **c. Akuntabilitas Proses**

Seacara umum proses pertanggungjawban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung dan Desa Teniga secara administarasi cukup baik, hal ini bisa dilihat ketepatan waktu saat pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa, namun berbeda dengan Desa Malaka yang telat dalam melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dari BPMD Kabupaten Lombok Utara, penyebab dari keterlambatan adalah kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Malaka yakni pengiputan Data ke aplikasi system keuangan Desa sehingga saat pembuatan Surat pertanggungjawabab (SPJ) terjadi kesalahan sehingga berdampak pada pertanggungjawaban keuangan Desa anggaran tahun 2017.

#### **d. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum**

Dari sisi kejujuran dan kepatuhan terhadap regulasi, Desa Tanjung telah mempertanggungjawabkan terkait dengan penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, pada pelaksanaan program bisa dikatakan baik karena melihat tingkat transparansi Desa yang cukup baik walaupun masih ada saran-saran dari warga agar pemaparan anggaran Desa di infokan di setiap Dusun di Desa Tanjung. Sedangkan Desa Tanjung secara pertanggungjawaban keuangan Desa pada anggaran tahun 2017 bisa dikatakan baik secara aturan dan administrasi, namun berbeda dengan Desa Malaka yang mengalami keterlambatan pertanggungjawaban keuangan Desa pada tahun 2017, hal ini disebabkan kesalahan operator Desa dalam menginput, sehingga proses pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) salah yang mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban keuangan Desa.

**e. Kepemimpinan yang berkampuan**

Secara umum kepemimpinan dari ke tiga Desa ini yaitu Desa Tanjung, Desa Teniga, dan Desa Malaka pada tahun 2017 memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai kepala Desa, hal ini dapat dilihat dari tingkat perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Daerah, tapi pada pelaksanaan masih memiliki kekurangan dan klemahan dalam pengelolaan dana Desa khususnya pada Desa Teniga dan Desa Malaka. Pada Desa Tanjung sejauh ini mendapatkan apresiasi yang bagus dari masyarakat walaupun tidak semua puas pada kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan Desa Teniga memiliki banyak keterbatasan SDM sehingga pada pelaksanaan khususnya pembangunan Desa, diserahkan ke pihak ketiga yaitu kontraktor untuk mengelola semua pembangunan fisik sehingga masyarakat merasa tidak terlibat yang mengakibatkan permasalahan karena masyarakat

Desa Teniga cukup partisipatif dalam pembangunan Desa, berbeda dengan Desa Malaka yang dimana pengelolaan dana pembangunan fisik dilakukan oleh pihak ketiga namun masyarakat tidak protes karena partisipasi masyarakat Desa Malaka yang kurang pada pembangunan Desa.

**f. Diterima oleh semua pihak**

Secara umum masyarakat Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka menerima bentuk kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Desa, karena pada pilihan kebijakan yang diambil berdasarkan kondisi yang memang menjadi keharusan pemerintah Desa untuk membuat kebijakan dengan menggunakan dana Desa pada anggaran tahun 2017. Pada Desa Tanjung sejauh ini melibatkan semua elemen masyarakat pada tahap perencanaan sehingga kepentingan masyarakat bisa secara umum terpenuhi dalam RKP Desa dengan merujuk pada RPJMDesa, sedangkan Desa Teniga pada tahap perencanaan program tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat padahal masyarakat disana cukup partisipatif dilihat dari keterlibatan masyarakat saat gotong royong pembangunan Desa, namun secara kebijakan pembangunan Desa masyarakat sebagian besar menerima kebijakan tersebut. Sementara Desa Malaka pada pemilihan kebijakan sejauh ini diterima oleh masyarakat, karena masyarakat Desa Malaka sendiri yang kurang partisipatif pada tahap perencanaan pembangunan Desa.

**g. Pemahaman masyarakat**

Pemahaman masyarakat terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Desa khususnya Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka yang menggunakan dana Desa ini masih tergolong baik, meskipun di Desa Teniga dan Desa Malaka masih belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses awal

perencanaan program, namun pada pelaksanaan kegiatan masyarakat dapat memahami dampak positif dari pilihan kebijakan dalam bidang pembangunan Desa oleh pemerintah, misalnya pada pembangunan jalan Desa di Desa Malaka tidak ada warga yang protes dan pada saat pembangunan talud di Desa Teniga masyarakat menerima dengan positif pilihan kebijakan dari pemerintah. Hal ini juga terjadi di Desa Tanjung yang menerapkan musrembang Dusun sehingga itu menjadi formulasi program Desa yang tertuang dalam RKPDesa dan masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung.

#### **h. Adaptasi secara terus menerus**

Secara umum pemerintah Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka terus berupaya dalam melakukan adaptasi atas perubahan pada masyarakat dan peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan dan Desa, namun pada kenyataan pelaksanaan dana Desa di tahun 2017 masih belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan karena masyarakat belum merasakan pemberian dana Desa secara maksimal, karena fokus pemerintah Desa secara umum hanya pada pembangunan fisik, sedangkan pembangunan kualitas SDM masih kurang, ini dilihat dari minimnya program pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa.